

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN  
İSBĀT NIKAH MASSAL TERHADAP PERNIKAHAN SIRI  
(Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2014-2015)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam  
Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
NURFADILAH  
NIM: 101011204  
M A K A S S A R

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadilah  
NIM : 101011204  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/ 24 April 1994  
Jurusan : Peradilan Agama  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Alamat : Jln. Onta Baru No. 17 Makassar  
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
DALAM PUTUSAN ISBĀT NIKAH MASSAL  
TERHADAP PERNIKAHAN SIRI (Kasus di  
Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2014-  
2015)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Makassar, 28 Maret 2016

Penulis,

Nurfadilah

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan inayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tumpah untuk Nabi Muhammad saw. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

١. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. dan Wakil Rektor I, II, dan III.
٢. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., dan para Wakil Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan dengan segala fasilitas dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti studi pada Kampus UIN Alauddin Makassar.
٣. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.Ag. dan Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag. masing-masing selaku pembimbing I dan II yang senantiasa membimbing dan mendorong serta mencurahkan perhatiannya kepada penulis di sela-sela kesibukannya, sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
٤. Dr. Supardin, M.Hi. dan Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Peradilan Agama serta jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
٥. Kedua orang tuaku terkhusus untuk Almh. Ibuku Hj. Nurmi yang senantiasa tak henti-hentinya memberikan dukungan secara moral dan materil serta do'a yang diberikan hingga beliau tutup usia.

٦. Kakak ku Nurzuhria, S.Pd. M.Pd bersama suaminya Armin Atmajaya, ST yang tak hentinya memberikan dorongan atas terselesainya skripsi ini.
٧. Serta seluruh saudaraku Dewi Ardeni, S.Pd.i M.Pd.i, Rezky Ananda, AMD, Ns. Dian Permatasari, S.kep yang senantiasa mendampingi dan membantu sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
٨. Kepala perpustakaan pusat UIN Alauddin beserta jajarannya yang turut mempermudah dan meminjamkan buku-buku yang ada relevansinya dengan tulisan ini
٩. Rakan-rekan di Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt., selalu memberikan rahmat dan hidayah serta balasan yang jauh lebih baik dan lebih berkah kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Amin ya Rabbal Alamin.

Makassar, ٢٨ Maret ٢٠١٦

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Nurfadilah

NIM: ١٠١٠٠١١٢٠٥٤

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN RANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1-5
B. Rumusan Masalah .....	5-6
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	6-8
D. Kajian Pustaka .....	8-9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9-11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan, Isbat Nikah dan Pencatatan Nikah	
1. Perkawinan ... ..	12
a. Pengertian Perkawinan .....	12-13
b. Prinsip-Prinsip (Asas-asas) Perkawinan.....	13-16
c. Syarat Sahnya Perkawinan.....	16-21
2. Pengertian Isbat Nikah.....	22
3. Prosedur Pengajuan Pencatatan Nikah .....	23-29
4. Landasan Hukum Pencatatan Nikah dan Isbat Nikah .....	29-32
5. Manfaat Pencatatan Nikah.....	32-33
B. Tinjauan Yuridis dan Teoritis Nikah Siri dan Nikah di Bawah Tangan	
1. Pengertian Nikah Siri dan Nikah di Bawah Tangan.....	33
2. Sebab-sebab yang Melandasi terjadinya Pernikahan Siri .....	35-37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>

A. Jenis Penelitian .....	38-39
B. Pendekatan Penelitian.....	39-40
C. Sumber Data .....	41
D. Metode Pengumpulan Data .....	42
E. Instrumen Penelitian .....	42-43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43-44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	45
B. Identitas Hakim.....	45-46
C. Pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara isbat nikah terhadap nikah siri yang terjadi setelah tahun 1974 pada penetapan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Makassar.....	46-54
D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam perkara isbat nikah terhadap pernikahan siri yang terjadi setelah tahun 1974.....	55-60
E. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika permohonan isbat nikah terhadap nikah siri yang terjadi setelah tahun 1974 dikabulkan.....	60-68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan.....	69-70
B. Saran.....	70-71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	71-74
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	75
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### ١. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## ٢. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

## ٣. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas



قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

#### ٤. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### ٥. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*(ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

#### ٦. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> ( <i>az-zalزالah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### ٧. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

#### ٨. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### ٩. *Lafz al-Jalāl* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمۡ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

#### ١٠. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥāmid Abū)

## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Maschi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS...../.....: ξ	: QS al-Baqarah/٢: ξ atau QS Āli 'Imrān/٣: ξ
HR	: Hadis Riwayat
t.tp.	: tanpa tempat penerbit
t.th.	: tanpa tahun
dkk	: dan kawan-kawan
Cet.	: Cetakan
h.	: halaman
r.a.	: <i>raḍiyallāhu 'anhu</i>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

Nama : Nurfadilah  
NIM : 10100112004  
Jurusan/Fakultas : Peradilan Agama/Syariah & Hukum Islam  
Judul : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Isbat Nikah Massal Terhadap Pernikahan Siri (Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2014-2015)

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan isbat Nikah Massal Terhadap Pernikahan Siri (Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2014-2015)” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara isbat nikah terhadap nikah siri yang terjadi setelah tahun 1994 pada penetapan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Makassar? 2) Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam perkara isbat nikah terhadap pernikahan siri yang terjadi setelah tahun 1994? 3) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika permohonan isbat nikah terhadap nikah siri yang terjadi setelah tahun 1994 dikabulkan? Adapun penelitian skripsi ini bertujuan, untuk menganalisa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam pemutusan Isbat Nikah setelah terbitnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1994, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif, hal ini dilakukan untuk mencari lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Makassar. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan memakai pedoman wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara isbat nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah terbitnya UUP khususnya pada putusan atau penetapan isbat nikah massal adalah semata-mata untuk kemaslahatan umta, untuk menjaga kemaslahatan anggota keluarga dari pemohon, melindungi kepentingan anak yang lahir kemudian dari pasangan tersebut. Pandangan para hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap Pelaksanaan isbat nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah terbitnya UU RI No. 1 Tahun 1994 adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat, selain itu Majelis Hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup kuat untuk mengabulkan perkara tersebut. Di antaranya adalah **pertama**, seorang hakim berpedoman pada sebuah kaedah hukum fiqh, **kedua**, bahwa seorang hakim mempunyai prinsip bahwa setiap perkara yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama haruslah diterima, termasuk pernikahan siri yang dilakukan setelah terbitnya UU RI No. 1 Tahun 1994. Hakim di Pengadilan Agama Makassar

menyadari akan dampak yang terjadi apabila setiap perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makassar dikabulkan, utamanya perkara nikah siri, diantaranya yaitu: banyaknya masyarakat yang meremehkan pentingnya pencatatan nikah dan pembuatan akta nikah karena mereka berfikir bahwa hal itu dapat dilakukan kapan saja. Selain itu juga akan semakin menjadi kebiasaan yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia akan aktifitas pernikahan siri ini yang akhirnya akan mempersubur status pernikahan ini.

Disarankan agar pernikahan siri yang dilakukan masyarakat selama ini cenderung membawa banyak kerepotan dan mudharat. Untuk itu sebaiknya Pengadilan Agama Kota Makassar lebih mempersempit lagi terhadap pengabulan perkara isbat nikah terhadap perkawinan siri yang dilakukan setelah terbitnya UU RI No. 1 Tahun 1974. Perlu ada tindak lanjut bagi pihak terkait seperti DEPAG, KUA, PA, serta pemerintah pusat terkait dengan penyuluhan tentang pencatatan nikah bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang masih tabu dan masih belum mempunyai pengetahuan luas akan pentingnya pencatatan nikah.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Fenomena pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa maupun figur-figur yang dikenal publik. Isu-isu seputar pernikahan siri masih menjadi bahan perbincangan banyak pihak, apalagi jika praktik tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memang dikenal luas oleh masyarakat. Berita terbaru dan paling menyita perhatian adalah kasus pernikahan siri antara Machicha Muchtar dan Moerdiono. Kasus ini bahkan sampai melibatkan Mahkamah Konstitusi, karena pihak Machicha Muchtar mengajukan *Judicial Review* terhadap pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Mahkamah Konstitusi bahkan mengabulkan permohonan Machicha dengan melakukan amandemen terhadap pasal tersebut sehingga bunyi pasalnya menjadi berubah dan menguntungkan pelaku pernikahan siri.<sup>1</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan Sunnah Allah swt., dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Sunnah Allah berarti menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan Sunnah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>2</sup> Dalam al-Qur'an Surat an-Nisā'/4:1.

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 46/PUU-VIII/2010. Menyatakan bahwa anak yang lahir di luar kawin mempunyai akibat hukum dengan ayah biologisnya, tidak lagi hanya dengan keluarga ibu.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 41



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai sekian manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>١</sup>

Pada hakikatnya pernikahan siri dari perspektif agama adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun demi menjaga ketertiban, negara berhak mengatur masalah pernikahan, sehingga pernikahan hendaknya dicatatkan pada Petugas Pencatat Pernikahan (bagi orang islam). Hal ini sesuai dengan bunyi pasal ٢ ayat ٢ Undang-Undang RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ bahwa “tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh Karena itu, dalam perkawinan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk oleh ٢ dimensi: dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi atau *stabilitas*.<sup>٤</sup> Untuk itulah di Indonesia di buat Undang-Undang RI Nomor ١ Tahun ١٩٧٤ Tentang Perkawinan, yang merupakan sumber hukum materil dari perkawinan.

Secara yuridis, permohonan isbat nikah mestinya diajukan oleh pasangan yang pernikahannya dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang RI No. ١

<sup>١</sup>Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, ١٤١٨ H, juz ٤, h. ١١٤

<sup>٤</sup>Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, ٢٠٠٥), h. ١٧



tahun 1994. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 jo. UU RI No. 3 Tahun 2006 jo. UU RI No. 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang pernikahan adalah mengeluarkan pernyataan tentang sahnyanya pernikahan yang terjadi sebelum UU RI No. 1 Tahun 1994 dan dijalankan menurut peraturan lain.<sup>o</sup>

Sebagai contoh dalam masalah *Isbat* Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 6 (ayat 3d) dijelaskan bahwa *Isbat* Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1994.<sup>1</sup>

Akan tetapi, realitanya banyak pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1994 namun permohonan *Isbat* Nikahnya diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Andi Syamsu Alam (Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung) berkaitan dengan *Isbat* Nikah bahwasanya tidak ada *Isbat* Nikah setelah berlakunya UU RI No. 1 Tahun 1994 kecuali pernikahan itu dilangsungkan sebelum UU tersebut lahir. Namun ketentuan tersebut bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam pasal 6 KHI. Namun demikian beliau tidak menganalisa permasalahan tersebut dari sisi pertimbangan hukumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>o</sup>Lihat Penjelasan pasal 49 (3) UU RI No. 7 Tahun 1989 (tidak diubah dalam UU RI No. 3 Tahun 2006).

<sup>1</sup>Menteri Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Waris Perwakafan, Impres No. 1 Tahun 1991 berikut penjelasan* (Surabaya: Karya Anda, 1991)

<sup>2</sup>Andi Syamsu Alam dalam "*Isbat Nikah Masih Jadi Masalah*," dikutip dari [www.hukumonline.com/ho/11111111/isbat-nikah-masih-jadi-masalah](http://www.hukumonline.com/ho/11111111/isbat-nikah-masih-jadi-masalah), diakses 14 Januari 2016.

Adanya perkara permohonan Isbat Nikah yang diterima dan dikabulkan mengindikasikan bahwa seolah-olah timbul kontradiksi antara aturan legal formal dan kenyataan empiris. Undang-undang tersebut (UU RI No. 3 Tahun 2006 jo. UU RI No. 50 Tahun 2009) adalah hukum formil dan landasan yuridis yang berlaku di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, putusan atau penetapan majelis hakim yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Isbat Nikah yang terjadi setelah tahun 1974, bisa dikatakan sebagai penyimpangan terhadap Undang-undang, kecuali hakim memang memiliki pertimbangan lain menurut ijtihadnya sendiri.

Semestinya para hakim dan corong masyarakat, ustad, kiai, mubaliq, meletakkan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum (fiqh) Islam Indonesia. Sehingga Undang-Undang inilah sebagai fiqh Islam yang diberlakukan di Indonesia, sama status dan otoritasnya dengan hukum (fiqh) Islam konvensional yang dikonsepkan para imam mazhab di zamannya. Sehingga tidak ada lagi istilah sah menurut agama tetapi belum menurut Negara. Dengan ungkapan lain, Undang-Undang itulah hukum Islam (agama) sekaligus hukum Negara.<sup>^</sup>

Negara Indonesia juga telah mengatur tentang perkawinan dengan di undangkannya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (1) yakni:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama”.

Pasangan suami isteri yang menikah namun belum memiliki buku akta nikah sebelumnya pernikahan mereka sah menurut hukum Islam, akan tetapi karena

---

<sup>^</sup>Khoiruddin Nasution, “Belajar dari Kasus Syech Puji”, <http://222.124.164.132/web/detail.php?sid=194163&actmenu=39>(diakses pada 10 juni 2009)

pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka pernikahan mereka tidak diakui oleh Negara. Memang dalam masalah urusan pencatatan nikah ini tidak disebutkan, baik di dalam nash Al-Qur'an maupun as-Sunnah, akan tetapi, untuk saat ini masalah pencatatan nikah telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 9.<sup>4</sup>

Ada sebagian masyarakat yang masih belum memiliki Akta Nikah, baik karena keterbatasan kemampuan ekonomi pasangan suami isteri tersebut dengan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA maupun ada salah satu persyaratan perkawinan yang kurang yang telah ditetapkan oleh pihak KUA, akibatnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak berani menikahkannya karena akan melanggar Undang-Undang RI tentang perkawinan. Oleh karena itu, Pemerintah mengadakan program *Isbat* Nikah massal yang dilakukan di tiap-tiap daerah dan kecamatan dan bekerja sama dengan pihak Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh *Isbat* Nikah tersebut yang dalam hal ini secara kompherensip penulis menuangkannya ke dalam karya ilmiah berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan *Isbat* Nikah Massal Terhadap Pernikahan Siri (Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2014-2015).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah pokok skripsi adalah:

### a) Pokok Masalah

---

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012), h. 8.

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara isbat nikah terhadap nikah siri yang terjadi setelah tahun 1974 pada penetapan isbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Makassar?

b) Sub Masalah

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam perkara isbat nikah terhadap pernikahan siri yang terjadi setelah tahun 1974?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika permohonan isbat nikah terhadap nikah siri yang terjadi setelah tahun 1974 dikabulkan?

### C. *Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian*

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, maka penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan, secara *etimologi* adalah persetubuhan atau perjanjian. Sedangkan secara *terminology* ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>11</sup> Perkawinan berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman.

---

<sup>11</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 1.

٢. *Īsbāt Nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>١١</sup> *Īsbāt nikah* kadang-kadang menggunakan istilah pengesahan perkawinan atau pengesahan nikah, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah *Īsbāt nikah*. Permohonan *Īsbāt nikah* bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (suami, siteri, anak-anak mereka, wali nikah)<sup>١٢</sup> ke Pengadilan Agama. Dengan diterbitkannya putusan atau penetapan *Īsbāt* dan dengan berpegang padanya, maka pelaku perkawinan siri (tidak tercatat) berhak mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di mana mereka melangsungkan perkawinan.

Penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum dalam putusan atau penetapan perkara permohonan *Īsbāt nikah* di Pengadilan Agama. Putusan *Īsbāt nikah* adalah produk Pengadilan Agama terhadap permohonan *Īsbāt nikah* yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri yang bersifat kontentius, sedangkan penetapan *Īsbāt nikah* adalah produk Pengadilan Agama terhadap permohonan *Īsbāt nikah* yang diajukan oleh suami dan isteri yang bersifat voluntair.<sup>١٣</sup>

Pengadilan Agama dalam hal ini tidak dibatasi oleh wilayah tertentu tetapi meliputi beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Pertimbangan ini didasarkan pada salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama yaitu mengeluarkan pernyataan *Īsbāt nikah* terhadap perkawinan yang terjadi setelah tahun ١٩٧٤. Meskipun pengajuan permohonan *Īsbāt nikah* adalah fenomena yang umum terjadi diseluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, dan alasan pengajuan *Īsbāt nikah* pun

---

<sup>١١</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, ١٩٩١), h. ٣٨٨.

<sup>١٢</sup> Pasal ٧ ayat ٤ Kompilasi Hukum Islam.

<sup>١٣</sup> Pelmizar, "Pengesahan Perkawinan (Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah), "tulisan dalam situs [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), ٢٠١٣.

sama yaitu sebagaimana disebutkan pada pasal 5 ayat 3 (a, b, c, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pertimbangan hukum yang digunakan hakim bisa saja berbeda satu sama lain.

Berdasarkan definisi operasional penelitian yang dikemukakan, dapat dirumuskan bahwa ruang lingkup pembahasan skripsi ini adalah mengetahui Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan *Isbat* Nikah Massal Terhadap Pernikahan Siri.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik serumpun dengan judul yang diangkat oleh penulis: Pertama “Implementasi *Isbat* Nikah Terhadap Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Study di Pengadilan Agama Mataram)”. Jurnal ini lebih fokus pada pengaturan hukum *isbat* nikah dan pencatatan nikah ditinjau dari hukum Indonesia dan implementasi *isbat* nikah di Pengadilan Agama Mataram.<sup>14</sup> Kedua “Analisis Penetapan Hakim No. 5/P/1990/PA.Cirebon Tentang Pengesahan Perkawinan yang dilaksanakan melalui kawin gantung di PA”.<sup>15</sup> Skripsi ini lebih fokus pada *isbat* nikah sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dilakukan melalui kawin gantung yang perkawinannya diisbatkan di Pengadilan Agama membahas analisis Penetapan Hakim pada perkara No. 5/P/1990/PA. Ketiga “*Isbat* Nikah Dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>14</sup>Widi Istikharati, “Implementasi *Isbat* Nikah Terhadap Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Study di Pengadilan Agama Mataram)”, Mataram, 2014.

<sup>15</sup>Imron, “Analisis Penetapan Hakim No. 5/P/1990/PA” Tentang Pengesahan Perkawinan yang dilaksanakan melalui kawin gantung di PA, skripsi ini tidak diterbitkan, Cirebon, 2007.

(Studi Analisis Pasal 5 KHI Isbat Nikah)<sup>11</sup> dalam skripsi ini membahas beberapa poin diantaranya : pengertian Isbat Nikah, di dalam penelitiannya penulis menemukan beberapa kerancuan. Dalam ketentuan Pasal 5 KHI tentang Isbat nikah terdapat ketidak tepatan. Sehingga Pasal ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Penulis merasa perlunya pengkajian ulang dalam pasal tersebut, karena pasal tersebut dapat dijadikan senjata bagi para pelaku nikah siri yang dapat seenaknya mengisbatkan nikahnya. Keempat “Isbat Nikah dan proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur).<sup>12</sup> Skripsi ini lebih fokus kepada banyaknya kasus isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan ingin mengetahui bagaimana proses persidangan isbat nikah sebelumnya adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil Dari data penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas masalah *“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Isbat Nikah Massal Terhadap Pernikahan Siri (Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Tahun 2014-2015)”*.

#### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai antara lain: menganalisa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>11</sup>Ahmad Muzaikhan, “Isbat Nikah Dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 5 KHI Isbat Nikah), skripsi ini tidak diterbitkan, Makassar, 2014.

<sup>12</sup>Ulfa Fouziah, “Isbat Nikah dan proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Jakarta Timur, 2008.



Makassar dalam keputusan Isbat̄ Nikah setelah terbitnya Undang-Undang RI Nomor ١ Tahun ١٩٧٤, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

## ٢. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini secara formal adalah untuk memenuhi persyaratan program akademik dalam rangka penyelesai studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutuskan perkara Isbat̄ Nikah setelah terbitnya Undang-Undang RI Nomor ١ Tahun ١٩٧٤, serta dampak yang terjadi akibat pengabulan isbat̄ nikah yang terjadi setelah terbitnya Undang-Undang RI Nomor ١ Tahun ١٩٧٤, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi:

### ١) Peneliti

Peneliti ini bertujuan untuk memuaskan rasa penasaran peneliti tentang apa yang menjadi landasan hukum bagi para hakim yang mengabulkan perkara Isbat̄ Nikah walaupun perkawinan tersebut terjadi setelah terbitnya Undang-Undang RI Nomor ١ Tahun ١٩٧٤, serta dampak yang terjadi akibat pengabulan Isbat̄ nikah yang terjadi setelah terbitnya Undang-Undang RI Nomor ١ Tahun ١٩٧٤, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

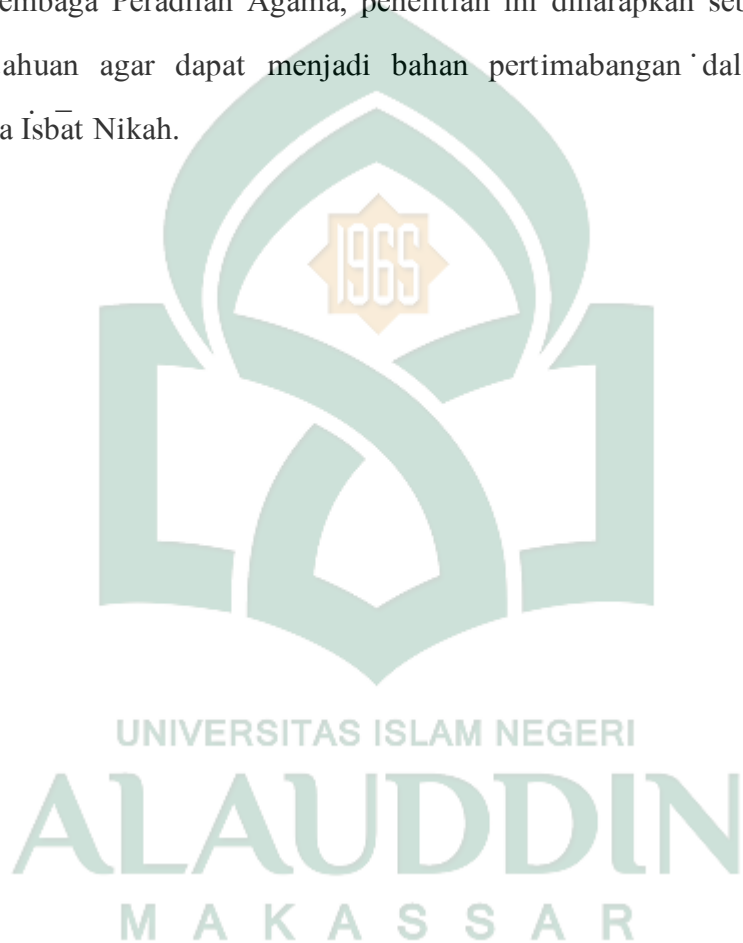
### ٢) Masyarakat



Hasil penelitian ini tentunya akan sangat berguna sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang peraturan Isbat Nikah yang sesuai dengan Undang-Undang RI tentang Perkawinan.

3) Lembaga Peradilan Agama

Bagi lembaga Peradilan Agama, penelitian ini diharapkan sebagai informasi pengetahuan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemutusan Perkara Isbat Nikah.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan, Isbat Nikah dan Pencatatan Nikah*

##### 1. Perkawinan (pernikahan)

###### a. Pengertian Perkawinan

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan hidup sebagai suami-isteri diluar perkawinan (pernikahan) adalah perzinahan. Dan perzinahan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk salah satu dosa besar.

Perkawinan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah “nikah” atau “zawaf”. Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan pengertian nikah menurut syara' yaitu, “Akad (*ijab'qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”.<sup>1</sup> Sedangkan pada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Melaksanakan perkawinan memang dianjurkan oleh Rasulullah saw, karena dengan adanya perkawinan maka akan terhindar dari segala yang merusak akhlak dan perbuatan zina.

---

<sup>1</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1998, h. 1.

Ketentuan dalam Pasal 1 UUP menjelaskan pengertian perkawinan yaitu, “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut Anwar Harjono pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.”

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu .aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian juga dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu.Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat satu kesatuan dalam tujuan tersebut.

#### **b. Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Perkawinan**

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yng terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Dalam UUP terdapat beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUP adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), h. 47.

<sup>7</sup> Arso Sosroatmodjo dan wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 47.

١. Asas sukarela, yang berarti UU ini menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahasia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
٢. Partisipasi keluarga, maksudnya bagi yang masih berada di bawah umur ٢١ tahun (pria dan wanita) maka diperlukan izin dari orang tua. Dalam keadaan orang tua tiada, maka izin diperoleh dari pihak wali.
٣. Menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, seorang suami lebih dari isteri selain juga dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan;
٤. Prinsip calon suami isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri dibawah umur;
٥. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus adanya alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan siding pengadilan;

7. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Kepastian hukum dalam suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, ini bertujuan untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia dan kekal, untuk menjamin kelangsungan kehidupan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam pemeliharaan dan pendidikan mereka, walaupun kedua orang tuanya tidak terikat dalam perkawinan lagi tetapi kewajiban kedua orang tua masih tetap berjalan karena adanya suatu hubungan hukum yang mengikat antara orang tua dan anak.

Pemerintah dalam menjalankan UUP khususnya mengenai pencatatan nikah, memberikan tugas kepada suatu lembaga Negara yaitu Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatat setiap perkawinan warganya yang kemudian dikeluarkan suatu akta yang merupakan bukti adanya suatu ikatan perkawinan dan juga merupakan pernyataan sahnya perkawinan tersebut di mata hukum. Sehingga dalam hal menjamin kepastian hukum seperti yang dijelaskan di atas, pemerintah mengharuskan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan agar melangsungkan perkawinannya di depan atau sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu perkawinan atau pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan. UUP menegaskan mengenai sahnya suatu perkawinan, yaitu pada Pasal 7 yang berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun suatu perkawinan bisa saja sah menurut agama tetapi di mata hukum justru tidak diakui. Hal tersebut dapat bahkan sering terjadi utamanya di kalangan masyarakat yang beragama Islam di Indonesia dimana ketika seseorang melangsungkan perkawinan tanpa melakukan pencatatan terhadap perkawinannya, dengan kata lain perkawinan tersebut dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Namun akibat yang ditimbulkan dari keadaan tersebut menjadikan perkawinan tersebut tidak diakui di mata hukum yang nantinya akan berdampak pada keturunan beserta harta benda para pihak.

### c. Syarat Sahnya perkawinan

#### 1. Menurut Hukum Islam (KHI)

Melakukan perkawinan maka haruslah dipenuhi beberapa persyaratan. Peraturan persyaratan bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam disebut rukun dan syarat-syaratnya. Dalam literature lebih dikenal dengan syarat materil dan syarat formil.

Rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak ada. Misalnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan.

Adapun yang termasuk rukun, antara lain:<sup>4</sup>

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya: beragama Islam terang ia seorang laki-laki (bukan banci), akil balig dan tidak sedang berikhsam atau umroh.
- b. Calon Isteri, syarat-syaratnya: beragama Islam atau ahli kitab, jelas ia perempuan, tertentu orangnya, tidak sedang ikhsam atau umroh.
- c. Wali, syarat-syaratnya: beragama Islam, sudah dewasa dan berakal, tidak banci, tidak dipaksa dan tidak sedang ikhsam atau umroh. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., dalam Riwayat empat orang ahli Hadis, terkecuali Nasai yang artinya:  

“Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal”
- d. Dua orang saksi laki-laki, syarat-syaratnya: beragama Islam, jelas ia laki-laki, telah dewasa, berakal dan adil, tidak tuna netra, tuna rungu dan mengerti maksud *ijab qabul*. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., yang artinya:  

“Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.
- e. *Ijab* dan *qabul*, *ijab* akad perkawinan ialah serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya. Sedangkan *qabul* akad perkawinan adalah serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya. Syarat-syaratnya adalah: dengan kata-kata yang terang, antara *ijab* dan *qabul* tidak terhalang oleh pembicaraan lain, dan tidak digantungkan atas sesuatu dan

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 20

didengar oleh saksi. Sabda Rasulullah SAW dalam Riwayat Muslim, yang artinya:

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah”

- f. Mahar (mas kawin), yang berarti sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri sebagai tukaran atau jaminan bagi suatu yang akan diterimanya dari diri calon isterinya. Pemberian mahar tersebut diwajibkan bagi laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah. Walaupun seandainya tidak disebutkan pada waktu akad, perkawinan tetap sah. Firman Allah swt., dalam Surat an-Nisa’ ayat ٤ yaitu

﴿مَرِيئًا هِنِيئًا فَاكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَن لِّكْمٍ طَيِّبٍ فَإِنْ حَلَّاهُ صَدَقْتِهِنَّ النِّسَاءَ وَأَتُواْ

Terjemahnya:

“Berilah perempuan yang kamu kawin itu suatu pemberian (mahar)”.<sup>o</sup>

Dalam KHI mengenai rukun dan syarat perkawinan diatur pada bab IV. Pada Pasal ١٤ KHI, diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

١. Calon suami
٢. Calon isteri
٣. Wali nikah
٤. Dua orang saksi; dan

---

<sup>o</sup> Kementerian Agama RI



٥. *Ijab dan qabul*

Selanjutnya pada Pasal ١٥ KHI diatur bahwa:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal ٧ Undang-Undang No. ١ Tahun ١٩٧٤ yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur ١٦ Tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur ٢١ Tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal ٦ ayat (٢), (٣), (٤) dan (٥) Undang-Undang No. ١ Tahun ١٩٧٤.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal ١٦ ayat (١) KHI, maka suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal ٢٠ KHI, maka yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah tersebut dapat terdiri dari wali nasab dan/atau wali hakim.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal ٢١ ayat (٢) KHI maka apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Selanjutnya sesuai dengan

ketentuan pada ayat (٢) maka apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya akan yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kearabat yang seayah. Sedangkan apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sam dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Mengenai saksi dalam perkawinan diatur juga dalam KHI Pasal ٢٤ ayat (١) dan (٢):

١. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah;
٢. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Yang dapat ditunjukkan menjadi saksi dalam akd nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.<sup>٦</sup> Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

#### ٢. Menurut Undang-Undang

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UUP antara lain:<sup>٧</sup>

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur ٢١ (dua puluh satu) Tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

---

<sup>٦</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal ٢٥.

<sup>٧</sup> UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤, *tentang Perkawinan*, Pasal (٦)-(١٢).

- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (٢) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (٢), (٣) dan (٤) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (٢), (٣) dan (٤) dalam Pasal ini.
- f. Tidak sedang terikat dengan perkawinan sebelumnya.
- g. Mempelai tidak mempunyai hubungan darah lurus keatas dan kesamping dalam saudara.
- h. Tidak sedang masa iddah.
- i. Kedua mempelai tidak sedang dilarang menikah oleh agamanya.
- j. Minimal berusia ١٩ Tahun untuk pria dan ١٦ Tahun bagi wanita.

## ٢. Pengertian *Isbat* Nikah

*Isbat* berasal dari bahasa Arab *atsbata – yutsbitu – itsbatan* yang artinya adalah penguatan. Sedangkan dalam kamus ilmiah populer kata *isbat* diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan.<sup>^</sup> Sedangkan Nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.<sup>^</sup> Dan lebih lanjut didalam Kamus Besar Indonesia didefinisikan *isbat* nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

Pasal ٧ ayat (١) dan (٢) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dari pengertian yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dihubungkan dengan Pasal ٧ Kompilasi Hukum Islam di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa *isbat* nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna mensabitkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.

---

<sup>^</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Akola, ١٩٩٤), ٢٧٣.

<sup>^</sup> *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, ٢٠٠٨), ٢٧١.

### ٣. Prosedur Pengajuan Pencatatan Nikah

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh pegawai pencatat perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan (pasal ٣ dan ٤ PP No. ٩ Tahun ١٩٧٥).

Dalam pasal ٣ berbunyi : (١) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (٢) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (١) dilakukan sekurang-kurangnya ١٠ (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (٣) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (٢) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Selanjutnya dalam pasal ٤ dijelaskan : “Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya”.

Selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang. Demikian pula meneliti surat-surat yang diperlukan (pasal ٥ dan ٦ PP No. ٩ Tahun ١٩٧٥) ini. Pasal ٥ berbunyi : “Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suaminya terhadulu”. Sedangkan dalam pasal ٦ dijelaskan : (١) “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut

Undang-Undang”. (٧) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (١) Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal ٦ ayat (٧), (٧), (٤) dan (٥) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur ٢١ (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal ٤ Undang-Undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal ٧ ayat (٧) Undang-Undang;
- f. Surat Kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (pasal ٧ ayat (٧) PP No. ٩ Tahun ١٩٧٥) dalam pasal ٧ ayat (٧) dijelaskan : “Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal ٦ ayat (٧) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya”.

Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak ada halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, dan menempelnya dikantor pencatatan yang mudah dibaca oleh umum.

Pengumuman serupa itu juga dilakukan dikantor pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (pasal ٨ dan penjelasan pasal ٩ PP No. ٩ Tahun ١٩٧٥). Dalam pasal ٨ dijelaskan : “Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Sedang dalam pasal ٩ berbunyi : Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat: **a.** Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat

kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu; **b.** Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Adapun pelaksanaan perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (pasal ١٠ PP No. ٩ Tahun ١٩٧٥).

Dalam pasal ١٠ dijelaskan : (١) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal ٨ Peraturan Pemerintah ini; (٢) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (٣) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal ١٣, ١٤, ١٥ dan ١٦ UU No. ١ Tahun ١٩٧٤).

Pasal ١٣ menjelaskan: Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal ١٤ berbunyi : (١) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(٢) Mereka yang tersebut pada ayat (١) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di



bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (١) pasal ini.

Sedangkan dalam pasal ١٥ menjelaskan : “Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal ٣ ayat (٢) dan Pasal ٤ Undang-Undang ini”.

Dalam pasal ١٦ : “(١) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal ٣ ayat (١), Pasal ٨ Pasal ٩, Pasal ١٠ dan Pasal ١٢ Undang-Undang ini tidak dipenuhi. (٢) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (١) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan pada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu akan dilaksanakan dengan memberitahukan perkawinan itu kepada pegawai pencatat yang pada gilirannya memberitahukan hal ini kepada para calon mempelai (pasal ١٧ UU No. ١ Tahun ١٩٧٤). Pasal ١٧ menjelaskan : (١) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilaksanakan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan; (٢) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (١) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan

dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (pasal ١٠ PP No. ٩ Tahun ١٩٧٥).

Dalam pasal ١٠ dijelaskan : (١) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal ٨ Peraturan Pemerintah ini; (٢) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (٣) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihindari oleh dua orang saksi. Dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, maka akad nikahnya dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Sesaat setelah melangsungkan perkawinan tersebut, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang kemudian di ikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan. Dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (pasal ١١ PP No. ٩ Tahun ١٩٧٥). Pasal ١١ menjelaskan : (١) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ١٠ Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku; (٢) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kdu saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melngsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh

wali nikah atau yang mewakilinya; (٣) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.<sup>١١</sup>

#### ٤. Landasan Hukum Pencatatan Nikah dan Isbat Nikah Massal

Pada dasarnya memang tidak kita temui dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas secara khusus tentang perintah pencatatan nikah, dan hal ini tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad saw. Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatat nikah maka pemerintah akan lebih mudah menesensus penduduk. Terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah.

Undang-Undang RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ tentang Perkawinan merupakan Undang-Undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR), yang ditandatangani pengesahannya pada tanggal ٢ Januari ١٩٧٤ oleh Presiden Soeharto, agar Undang-Undang Perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. ٩ Tahun ١٩٧٥. Undang-Undang ini merupakan hasil Usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi.<sup>١٢</sup>

---

<sup>١١</sup> Hukum Perkawinan di Indonesia Suatu Analisis UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ dan KHI

<sup>١٢</sup> Variasi hukum yang dimaksud adalah (١) Regeling op de Gemengde Huwelijken (staatsblas ١٨٩٨-١٥٨; staatsblas = Lembaran Negara/LN), yakni peraturan perkawinan campuran, yang dikenal dengan GHR. (٢) Huwelijksordonnantie vor christen Indonesia Java, Minahasaen Ambina (staatsbad ١٩٣٣-٧٤), yaitu ordonasi (Undang-undang) Perkawinan orang Indonesia Kristen di Jawa dan Madura, Minahasa/Keresidenan, Manado, dan Ambon yang dikenal dengan singkatan HOCI. (٣) UU No. ٣٢/١٩٥٤ tentang penetapan berlakunya Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk (LN. ١٩٥٤-٣٢); dan (٤) Burgelijk wetboek (BW), yaitu kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Isbat Nikah adalah sebuah proses Pencatatan Nikah terhadap pernikahan siri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ pasal ٢ ayat (١) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ pasal ٢ ayat (٢) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. ٩ Tahun ١٩٧٠ dan Peraturan Menteri Agama No. ٢ dan ٤ Tahun ١٩٧٠ bab II Pasal ٢ ayat (١) PP No. ٩ Tahun ١٩٧٠, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. ٣ Tahun ١٩٠٤, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.<sup>١٢</sup>

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntuhkan bagi mereka yang melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah tentang Nomor ٩ Tahun ١٩٧٠; penjelasan pasal ٤٩ ayat (٢) yang berbunyi: “Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang RI Nomor ١ Tahun ١٩٧٤ tentang Perkawinan”, serta dalam Pasal ٦٤ UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum

---

<sup>١٢</sup>Hukum Perkawinan di Indonesia suatu analisis UU RI NO. ١ Tahun ١٩٧٤ & KHI.

Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.

Namun kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbat nikah*nya ke Pengadilan Agamanya”. Pada ayat (3) disebutkan: *Isbat Nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.<sup>12</sup>

Dengan melihat uraian dari pasal 5 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik oleh UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI No. 12 Tahun 1990 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu Peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.

---

<sup>12</sup>Nasruddin Salim, “Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis)”, *Mimbar Hukum*, 72 (September-Oktober, 2003), h. 50.

Mengenai isbat nikah ini ada PERMENAG Nomor 3 Tahun 1990 yang dalam pasal 39 ayat (4) menentukan jika KUA tidak bisa membuatkan *duplikat* akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama; akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

#### o. Manfaat Pencatatan Nikah

Akta Nikah adalah alat bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang, adalah sangat bermanfaat dan mashlahat dan bagi diri dan keluarganya (istri dan anak anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingatan atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan), dan juga untuk melindungi dari fitnah dan tuhmah atau qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan akta tersebut sangat penting untuk sadduz zari'ah (tindakan pencegahan) dan juga *maslahah mursalah* (kemaslahatan umat).

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan itu adalah sudah meupakan “Kesepakatan nasional” yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Oleh Karena itu, terhadap pelanggaran atas peraturan ini dikenakan sanksi pidana yakni untuk pelanggaran terhadap pasal-pasal 10 ayat (3) dan 40 PP No. 9 Tahun 1990; dihukum dengan denda setinggi-tingginya Rp. 7. 000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan PPN yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat (1), (11), (13), dan (44) hukuman kurungan selam-lamanya 3 bulan atau

denda setinggi-tingginya Rp. ٧. ٥٠٠,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) hukuman pidana tersebut diatur pada pasal ٤٥ ayat (١) dan (٢) yang dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran.

Pasal ٤٥ menjelaskan: (١) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka: **a.** Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal ٣, ١٠ ayat (٣), ٤٠ Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. ٧. ٥٠٠,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); **b.** Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal ٦, ٧, ٨, ٩, ١٠ ayat (١), (١١), (١٣), (٤٤) Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya ٣ (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp./ ٧. ٥٠٠,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(٢) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (١) diatas merupakan pelanggaran meskipun aturan pelaksanaan tentang ini belum ada, namun ancaman terhadap Undang-Undang ini sesungguhnya justru dimaksudkan sebagai upaya untuk merefleksikan nilai ketertiban dan kedisiplinan masyarakat, disamping itu pula untuk lebih mengefektifkan pengaruh *prevensi general* dalam rangka mencegah perkawinan di bawah tangan untuk masa-masa yang akan datang.

## ***B. Tinjauan Yuridis dan Teoretis Terhadap Nikah Siri atau Nikah Di Bawah Tangan***

### **١. Pengertian Nikah Siri atau Nikah di Bawah Tangan**



Nikah siri terdiri dari kata Nikah dan Siri. Kata *Siri* yang berarti rahasia adalah lawan dari kata *Jahri* alias terang-terangan (Terbuka bagi umum).<sup>١٤</sup> Menurut terminology Fiqh Maliki, nikah Sirri ialah: “*Nikah yang atas Pesan Suami, para saksi merahasiakannya untuk isteri atau jama’ahnya, sekalipun keluarga setempat*”.<sup>١٥</sup>

Mazhab Maliki tidak membolehkan Nikah Siri. Nikahnya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya bisa dikenakan hukuman *Had* (dera atau rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Hanafi dan Syafi’i juga tidak membolehkan nikah siri. Menurut Mazhab Hambali nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan Syari’ah Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua calon mempelai, wali, dan para saksinya. Hanya saja hukumannya makruh.

Dari pengamatan di lapangan terdapat beberapa bentuk Nikah Siri di antaranya:

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; ***Pertama***; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absahan pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memutuskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;

***Kedua***, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di lembaga pencatatan Negara (dalam hal ini adalah KUA). Banyak faktor yang

---

<sup>١٤</sup> Wildan Suyuti Mustofa, “Nikah Siri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)”, *Mimbar Hukum*, ٦٠ (Maret-April, ٢٠٠٣), h. ٣٥

<sup>١٥</sup> Masjfuk Zuhdi, “Nikah Siri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anakny Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” *Mimbar Hukum*, ٦٠ (Maret-April, ٢٠٠٣), h. ٨



menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil Negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.

*Ketiga*, pernikahan yang dirahsiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.<sup>١٦</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan dilembaga yang ditunjuk dengan demikian pencatatan yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya akta berupa Surat Nikah oleh pejabat yang berwenang maka fungsi akta merupakan alat bukti yang sempurna (*authentic*).

## ٢. Sebab-sebab Yang Melandasi Terjadinya Pernikahan Siri

Apabila melihat terjadinya pernikahan siri yang dilakukan, yang nampaknya ada dua hal yang menyebabkannya, yaitu:

a. Faktor-faktor di luar kemampuan si pelamar seperti:

---

<sup>١٦</sup> [http://www.mediasilIslam.Net//portal opini dan solusi islam](http://www.mediasilIslam.Net//portal%20opini%20dan%20solusi%20islam), diakses tanggal ٥ Januari ٢٠١٦.

- ١) Menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang menurut agama islam karena masih sama-sama kuliah atau sambil menunggu selesai kuliah.
  - ٢) Tidak adanya izin wali nikah (orang tua).
  - ٣) Sulit memperoleh surat izin dari isteri dalam hal suami akan menikah lebih dari seorang.
  - ٤) Adanya kekhawatiran kehilangan hak pension janda.
- b. Adanya pendapat bahwa pencatatan nikah tidak merupakan perintah agama, karena tidak dilakukan dijamin Nabi.<sup>١٧</sup>

Terhadap nikah siri yang disebabkan tidak adanya izin orang tua, tanp wali nasab/ wali hakim pada umumnya didasarkan pada pendapat bahwa wali nasab bahkan wali hakim itu tidak wajib hukumnya, mereka menganggap bahwa masalah hubungannya dengan orang tua/wali adalah soal sopan santun atau tata karma saja.

Sedangkan pasal ١٩ Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yakni yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah menurut pasal ٢٠ KHI adalah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Nikah siri pada dasarnya merupakan penyimpangan sosial yang kerap kali menimbulkan kerepotan dan *madhorot*. Dan sesungguhnya nikah yang tidak siri sesungguhnya banyak maslahatnya.

---

<sup>١٧</sup>Wildan Suyuti Mustofa, "Nikah Siri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum), *Mimbar Hukum*, ٦٠ (Maret-April, ٢٠٠٣), h. ٣٦.

Masalahnya adalah bahwa kerepotan ini dapat muncul dalam bentuk perselisian yang menyangkut hak yang disengketakan, maka menurut hukum akan diselesaikan oleh peradilan dalam hal ini oleh Pengadilan Agama yang menurut pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1989 disebut salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu.

Pasal 49 UU RI No. 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan dan kewarisan.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agar terjamin ketertibannya, maka harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian lapangan (*field Reseach*), yang dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan statistic atau dengan cara-cara lain dari kualitatifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisme organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.<sup>1</sup> Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk fenomena-fenomena setting sosial yang terjadi dilapangan.<sup>2</sup>

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>3</sup>

Terkait dengan penelitian lapangan, peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Anselm Strans & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 11.

<sup>2</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial "Kualitatif & Kuantitatif"* (Jakarta: GP Pres, 2008), h. 187.

<sup>3</sup> Lexi J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 3.

<sup>4</sup> Lexi J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 26.

Dalam hal ini peneliti mencoba memahami pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap putusan *Isbat* Nikah dalam perkawinan siri yang dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.

Selain itu peneliti juga mencoba untuk menggali pendapat dari hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai Dampak yang terjadi akibat dikabulkannya pernikahan siri yang dilakukan setelah terbitnya UU RI No. 1 Tahun 1974. Serta solusi yang dapat diberikan oleh seorang hakim terhadap permasalahan tersebut.

Jika ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Menurut Whirney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pertimbangan-pertimbangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>o</sup> Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan sebuah objek secara sistematis. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang respon hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap Putusan perkara *Isbat* Nikah. Serta mendeskripsikan pendapat para hakim tentang dampak yang terjadi akibat dikabulkannya pernikahan siri. Serta solusi apa yang dapat diberikan oleh seorang hakim terhadap permasalahan tersebut.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya.

---

<sup>o</sup>Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 54-55.

Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menentukan kebenaran atau untuk lebih mudah membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf, penelitian maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Pada penelitian ini digunakan pendekatan interpretatif dan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan interpretatif ini dipakai pada penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini mengarahkan pada peneliti untuk mengetahui bagaimana cara untuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya dengan sedemikian rupa, sehingga dapat memahami bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap perkara Isbat Nikah serta bagaimana pandangan hakim terhadap dampak yang terjadi akibat dikabulkannya pernikahan siri, serta solusi apa yang dapat diberikan oleh seorang hakim terhadap permasalahan tersebut.

Adapun pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak perlu di kualitatif/tidak perlu mengadakan perhitungan. Bogdan dan Tailor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).

Secara umum penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dll secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### ***C. Sumber Data Penelitian***

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

١. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama/primer. Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data emiks dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar.
٢. Data Sekunder, adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Yaitu berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan mediasi dll. Data sekunder dapat dibagi atas:
  - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hokum primer adalah Undang-Undang RI Nomor ١ Tahun ١٩٧٤ tentang Perkawinan, Undang-Undang RI No. ٣٢ Tahun ١٩٥٤ tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, PP No. ٩ Tahun ١٩٧٥ tentang Pencatatan Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal ٧ ayat ٣ (e).
  - b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan yang menjelaskan bahan hokum primer, seperti RUU, hasil penelitian, pendapat pakar, hasil karya ilmiah, mimbar hokum, jurnal, dll.
  - c. Bahan hukum Tersier: Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi, indeks.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **١. Pengamatan (Observasi)**

Observasi/pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitian yang sedang diteliti.

##### **٢. Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Di dalam bukunya Moh Nadzir dijelaskan, yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

##### **٣. Dokumentasi**

Yaitu peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Di dalam penelitian ini peneliti mencari dokumentasi di Pengadilan Agama Makassar yang terkait dengan putusan perkara Isbat Nikah yang terjadi setelah tahun ١٩٧٤ dll.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian *field research* kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, yakni mencari informasi dari pemerintah setempat, masyarakat yang melakukan Isbat Nikah.



Instrumen adalah sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Menentukan instrumen harus memperhatikan faktor reliabilitas (keterandalan) dan validitas (kesahihan) di samping itu, instrument juga harus memiliki sifat keterbukaan agar data yang diperoleh dapat lebih baik kualitasnya, sehingga suatu penelitian mutlak membutuhkan instrument dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan. Instrumen lain yang digunakan adalah:

#### ١. Pedoman Wawancara

Instrumen ini dipakai untuk melengkapi data dan informasi yang dikumpulkan pada metode pengumpulan data lainnya. Wawancara digunakan karena penulis ingin mengetahui hal-hal baik dari Hakim Pengadilan Agama sehingga diteliti secara mendalam seperti: Hakim ketua dan Hakim anggota (data primer) dan informan sebagai data pendukung.

#### ٢. Pedoman *field note*

Instrumen ini disebut juga catatan lapangan dalam melakukan observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yakni Hakim Pengadilan Agama Makassar.

#### ٣. Dokumentasi

Data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topic penelitian, adapun instrument yang digunakan berupa tape recorder, kamera dan catatan lapangan, berupa catatan deskriptif.

### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Di dalam mengelolah data, penulis melakukan beberapa upaya, antara lain :

١. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Makassar.
٢. *Analizing*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sistesis, menyusun ke dalam pola, memilih msns yang penting dan aman yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
٣. *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar*

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi *qāḍhi*, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. *Qāḍhi* Pertama di Makassar adalah *Maknun Dg. Manranoka*, bertempat tinggal dikampung laras, *qāḍhi* lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah *qāḍhi* terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting *qāḍhi*. *Qāḍhi* dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syari'ah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah *qāḍhi* yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Tallo dan dahulu *qāḍhi* diberi gelar *Daengta Syeh* kemudian gelar itu berganti menjadi *Daengta Kalia*.

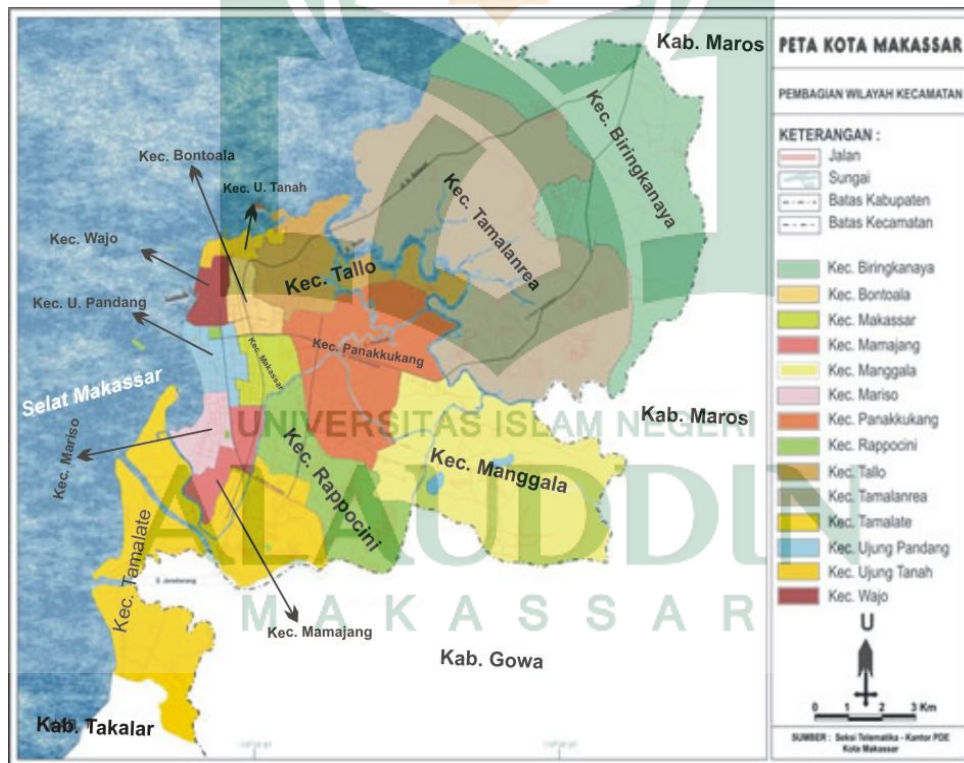
Setelah keluarnya PP. No. 40 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut "Pengadilan

Mahkamah Syari'ah" adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut:

**a. Wilayah Yurisdiksi**

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar;
- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Maros;
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bone;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa.



Wilayah yurisdiksi pengadilan agama/mahkamah syari'ah makassar dahulu hanya terdiri 9 (sembilan) kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (empat belas) kecamatan.<sup>1</sup>

### **b. Keadaan Gedung**

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1996 telah memperoleh gedung permanen seluas 100 m<sup>2</sup> untuk rencana pembangunan lima tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan sdm yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 pengadilan agama makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke gedung baru yang bertempat di jalan perintis kemerdekaan km. 14 daya makassar dengan luas lahan (tanah) 2.99 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 1.887,0 m<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

### **c. Visi dan Misi**

Adapun visi Pengadilan Agama Makassar adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.”

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. bersih dan bebas kkn merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya

<sup>1</sup>[Pamakassar.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=66&Itemid=110](http://Pamakassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=110) (tanggal 11 februari 2016).

<sup>2</sup>[pa-makassar.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=66&Itemid=110](http://pa-makassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=110) (11 februari 2016).

suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat.

Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesionalisme manajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah:

١. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
٢. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
٣. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
٤. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.<sup>٣</sup>

#### **d. Keadaan Pegawai dari Masa ke Masa**

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai (SDM) sebanyak <sup>٩</sup> orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan

---

<sup>٣</sup> pa-makassar.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=٦٧&Itemid=١١٥.(١١ februari ٢٠١٦).

susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma.

Hakim ketua honorer yaitu H. *Kallasi Dg. Mallaga*, K.H.M. Syarif *Andi Rukka*, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. *Dg. Mai, Daeng Takadi* (H. Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki ٧ orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan uu nomor ١ tahun ١٩٧٤, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah volume perkara. berikut ini adalah susunan ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa :

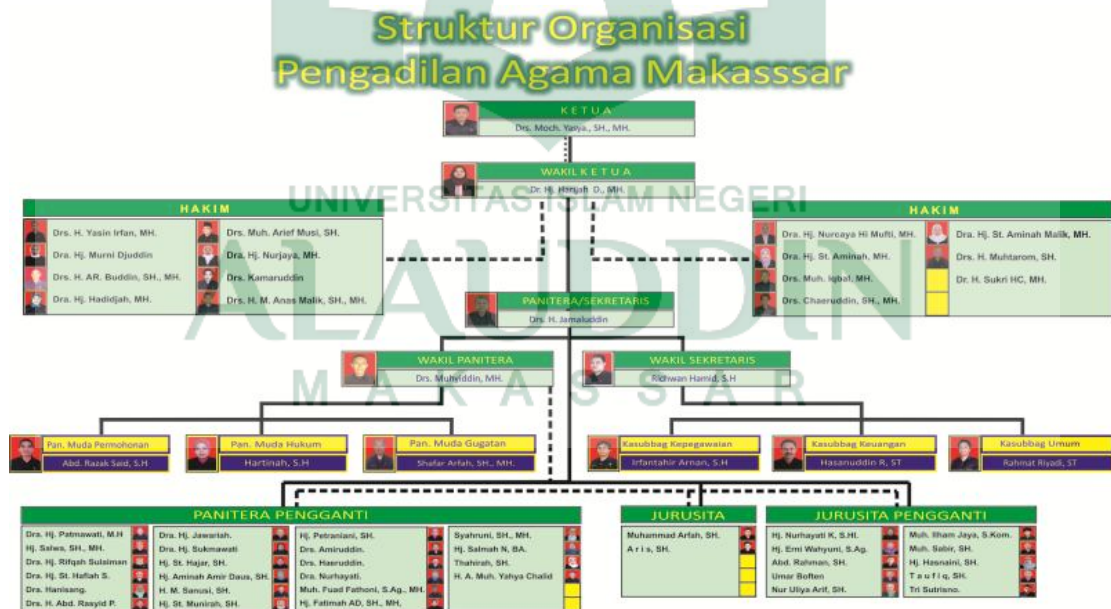
١. Ketua Pertama : K.H. Chalid Husain (Periode Tahun ١٩٦٠ s/d Tahun ١٩٦٢)
٢. Ketua Kedua : K.H. Syekh Alwi Al Ahdal (Periode Tahun ١٩٦٢ s/d Tahun ١٩٦٤)
٣. Ketua Ketiga : K.H. Haruna Rasyid (Periode Tahun ١٩٦٤ s/d Tahun ١٩٧٦)
٤. Ketua Keempat : K.H. Chalid Husain (Periode Tahun ١٩٧٦ s/d Tahun ١٩٨٦)
٥. Ketua Kelima : Drs. H. Jusmi Hakim, S.H (Periode Tahun ١٩٨٦ s/d Tahun ١٩٩٦)
٦. Ketua Keenam : Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H (Periode Tahun ١٩٩٦ s/d Tahun ١٩٩٨)
٧. Ketua Ketujuh : Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H (Periode Tahun ١٩٩٨ s/d Tahun ٢٠٠٤)



8. Ketua Kedelapan : Drs. H. M. Tahir R, S.H. (Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2005)
9. Ketua Kesembilan : Drs. Anwar Rahmad, M.H. (Periode Tahun 2005 s/d Tahun 2008)
10. Ketua Kesepuluh : Drs. Khaeril R, M.H. (Periode Tahun 2008 s/d Tahun 2010)
11. Ketua Kesebelas : Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H (Periode Tahun 2010 s/d 2013)
12. Ketua Duabelas : Drs. H. Usman S,SH (Periode Tahun 2013 s/d 2014)
13. Ketua Tigabelas : Drs. Moh. Yasya', SH.,MH. (Periode Tahun 2014 s/d sekarang)<sup>4</sup>

#### e. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Makassar



Keterangan:  
——— Garis Komando  
----- Garis Koordinasi

<sup>4</sup> [pa-makassar.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=14&Itemid=110](http://pa-makassar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=110). ( 11 februari 2016).



Tabel 4.1

Struktur Organisasi Organisasi Pengadilan Agama Makassar<sup>o</sup>

Ketua	Drs. Moh. Yasya', SH.,MH.
Wakil ketua	Dr. Hj.Harijah D, M.H.
Hakim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dra.Hj. Hadidjah, M.H.</li> <li>• Dra. Hj. Nurjaya, MH.</li> <li>• Drs. Muh. Arief Musi, S.H.</li> <li>• Drs. AR. Buddin. SH.</li> <li>• Drs. Kamaruddin.</li> <li>• H. Sutarman, S.H.</li> <li>• Drs.H. Muhtarom S.H.</li> <li>• Drs. Chaeruddin S.H., M.H.</li> <li>• Drs. Muh. Iqbal, M.H.</li> <li>• Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.</li> <li>• H. Abdul Hanan, S.H., M.H.</li> <li>• Drs. Hanafie Lamuha.</li> <li>• Drs. H. Imbalo S.H., M.H.</li> <li>• Dr. H. Sukri HC M.H.</li> <li>• Drs. H. Maddatuang.</li> <li>• Dra.Hj. Murni Djuddin</li> <li>• Drs. H. Yasin Irfan M.H.</li> <li>• Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti M.H.</li> </ul>
Panitera/sekretaris	Drs. H. Jamaluddin.
Wakil panitera	Drs. Muhyiddin MH.
Wakil sekretaris	Richwan Hamid,SH.
Panitera muda gugatan	Safar Arfah, SH. MH.
Panitera muda permohonan	Abd. Razak Said, SH.
Panitera muda hokum	Hartinah,SH.
Panitera pengganti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dra. Hj. Patmawati, MH.</li> <li>• Hj. Salwa, SH., MH.</li> <li>• Dra. Hj. Rifqah Sulaiman.</li> <li>• Dra. Hj. St. Hafiah S.</li> <li>• Dra. Hanisang.</li> <li>• Drs. H. Abd. Rasyid P.</li> <li>• Dra. Hj. Jawariah.</li> </ul>

<sup>o</sup> pa-makassar.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=77&Itemid=110.( 11 februari 2016).

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dra. Hj Sukmawati.</li> <li>• Hj. St. Hajar, SH.</li> <li>• Hj. Aminah Amir Daus, SH.</li> <li>• H. M. Sunusi, SH.</li> <li>• Hj. St. Munirah, SH.</li> <li>• Hj. Petraniani, SH.</li> <li>• H. Andi Muhammad Yahya Chalid.</li> <li>• Thahirah, SH.</li> <li>• Hj. Salmah N, BA.</li> <li>• Syahrini, SH., MH.</li> <li>• Hj. Fatimah AD., SH., MH.</li> <li>• Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag, MH.</li> <li>• Drs. Haeruddin.</li> <li>• Drs. Amiruddin.</li> </ul>
Jurusita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muhammad Arfah, SH.</li> <li>• Aris, SH.</li> </ul>
Jurusita pengganti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hj. Nurhayati, S.H.</li> <li>• Abd. Rahman, SH.</li> <li>• Umar Boften.</li> <li>• Nur Uliya Arif, SH. MH.</li> <li>• Muhammad Ilham Jaya S.kom.</li> <li>• Muh. Sabir, SH.</li> <li>• Hj. Hasnaini, SH.</li> <li>• Taufik.</li> </ul>
Kasubbag Kepegawaian	Irfan Tahir Arnan, SH.
Kasubbag keuangan	Hasanuddin, ST.
Kasubbag Umum	Rahmat Riyadi, ST.
Staf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musdalifah, SH.</li> <li>• Rima Arisanty.</li> <li>• Haeriah.</li> <li>• Saharuddin.</li> <li>• Ardhayani Arja.</li> </ul>

## B. *Identitas Hakim*

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tiga hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar untuk memberikan data kepada

peneliti terhadap penulisan skripsi ini dengan judul “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Isbat Nikah Massal Terhadap Pernikahan Siri (Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun ٢٠١٤-٢٠١٥)*”. Adapun identitas hakim tersebut sebagai berikut:

Narasumber utama yaitu:

Nama : Drs. Chaeruddin, SH, MH.

Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan

Jabatan : Hakim

Adapun beberapa hakim yang bersedia memberi narasumbernya:

Nama : Drs. H. Yasin Irfan, SH, MH.

Alamat : Perm. Griya Prima Tonasa

Jabatan : Hakim

Nama : Drs. H. M. Anas Malik, SH, MH.

Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan

Jabatan : Hakim

### ***C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Menutus Perkara Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Yang Terjadi Setelah Tahun ١٩٧٤ Pada Penetapan Isbat Nikah massal oleh Pengadilan Agama Makassar***

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, isteri, dan anak-anak. Untuk terjamin dan terlindunginya pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sahnyanya status hukum perkawinan menjadi sangat penting dan menentukan. Perkara yang timbul dalam kehidupan keluarga yang diakibatkan pelanggaran hak-haknya akan mendapatkan perlindungan hukum, bilamana status hukum perkawinan

tersebut sah, (baik secara syari'at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia).

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkara dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa bagi umat Islam, perkawinan yang sah dan sekaligus mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Syari'ah Islam yakni memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dicatat sesuai perlindungan yang berlaku. Sehingga suami-isteri memperoleh akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pasal 5 (1) KHI. Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan Syari'ah Islam tanpa dicatatkan sebagaimana dikehendaki oleh UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka disebut sebagai perkawinan liar atau perkawinan dibawah tangan dan yang sedang actual sekarang disebut nikah siri. Di Indonesia pernikahan seperti itu (nikah siri) tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Makassar ditetapkan pada tahun 2014 sampai saat ini masih banyak perkara yang ditolak dan diterima. Namun setelah tahun 2014 perkara isbat nikah sudah mulai ada perkara yang didaftarkan yakni pada hari selasa tanggal 10 Juli 2014 dengan nomor perkara 020/Pdt.P/2014/PA/Mks, hari senin tanggal 05 Januari 2015 dengan nomor perkara 04/Pdt.P/2015/PA/Mks, hari senin tanggal 23 Nopember 2015 dengan nomor

perkara ๔.๖/Pdt.P/๒.๑๐/PA/Mks.<sup>๖</sup> Selama ๒.๑๔-๒.๑๐ yang terdaftar dalam perkara isbat nikah sebanyak ๔.๖ perkara. Meskipun jumlah perkara isbat nikah sudah banyak, akan tetapi ditahun ๒.๑๔ perkara isbat nikah sudah mulai mendapatkan respon dari pihak Pengadilan Agama Makassar dikarenakan adanya kerja sama dengan Pemerintah setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. Chaeruddin, SH, MH. Beliau menyatakan bahwa:

“Bahwa Dalam Pasal ๖ ayat ๓ KHI terdiri dari beberapa sub Pasal a,b,c,,d dan e. tetapi sebagai jalan keluar melihat keadaan sekarang ini, maka hakim mengabulkan permohonan mereka dengan mempergunakan huruf e. yang tidak mempunyai halangan berdasarkan UU perkawinan. Selama persidangan kami menilai mengenai perkawinan mereka, sepanjang tidak ada halangan menurut UU perkawinan maka kami kabulkan, sebagai salah satu alternative yang dipergunakan oleh hakim. Dengan membawa pertimbangan yang lain, melihat anak sudah lahir, ada kebutuhan si anak, ini untuk kepentingan si anak, untuk akta kelahiran, kami melihat anak itu sebagai korban dari adanya perkawinan ini, maka kami menggunakan huruf e ini yang didukung dengan pertimbangan mengenai keadaan dan kepentingan si anak tadi. Dan melihat apakah perkawinannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, jadi kita pakai alternative e itu. Karena Pasal ๓ adalah alternatif, bukan kumulatif”<sup>๗</sup>

Suatu perbuatan “Kawin” atau “Nikah”, baru dapat dikatakan sebagai “perbuatan hukum” apabila dilakukan menurut ketentuan yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UUP dan PP No. ๙ Tahun ๑๙๗๐ Tentang Pelaksanaan UU RI No. ๑ Tahun ๑๙๗๔ Tentang Perkawinan.

<sup>๖</sup> Pa-makassar.go.id/index.php?=com\_wrapper&view=wrapper&itemid=๒๑๗. Statistic Perkara berdasarkan Jenis Perkara. (tanggal ๐๙ Februari ๒.๑๖).

<sup>๗</sup> Drs. Chaeruddin, MH, Wanwancara Hakim Pengadilan Agama, Makassar, ๑๑ Februari ๒.๑๖.

Perkawinan dengan tatacara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Jika dilihat dalam KHI pada Pasal 6 dan 7, ternyata unsur sah dan unsur tatacara pernikahannya dilakukan secara kumulatif, bahkan pada Pasal 7 ayat (1) KHI dikatakan bahwa, “perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN”, dengan demikian KHI sudah menyatakan bahwa unsur pencatatan menjadi syarat adanya nikah yang sah. Maksud dari mendapatkan pengakuan hukum adalah pelaku nikah akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti bahwa mereka adalah pasangan sah suami isteri.

Penetapan Isbat nikah massal yang dilakukan oleh pengadilan Agama Makassar yang bekerja sama dengan pemerintah kota Makassar adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan yang biasa diistilahkan dengan pengadilan keliling, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan terpadu. Penetapan isbat nikah massal ini dilaksanakan di gedung PKK Kota Makassar pada tanggal 22 Maret 2014. Jumlah perkara yang masuk yaitu 406 perkara dengan kata lain jumlah pemohon yaitu 406 pasang. Pada persidangan ini perkara diperiksa dan diadili dengan hakim tunggal merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair isbat nikah dalam Pelayanan Terpadu. Pada isbat nikah ini mayoritas pemohon adalah mereka pasangan yang pernikahannya tidak tercatat (nikah siri) yang terjadi setelah tahun 1974 dimana hampir semua

permohonan dikabulkan. Adapun beberapa permohonan tidak dikabulkan karena pihak yang bersangkutan tidak hadir pada saat persidangan.

Melihat banyaknya perkara *isbat* nikah pada penetapan *isbat* nikah massal tersebut yang mayoritas permohonan berasal dari pasangan nikah siri yang terjadi setelah tahun 1994, maka penulis berkeinginan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara *isbat* nikah terhadap nikah siri yang terjadi setelah tahun 1994.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, maka Bapak Drs. Chaeruddin, MH. Menyatakan bahwa:

“Salah satu contoh jika pasangan yang menikah siri ingin mengisbatkan perkawinannya tetapi tidak ada kepentingan yang lain seperti anak belum ada, belum ada anak yang memerlukan akta nikah ini maka kami juga tidak langsung menerapkan huruf e ini, dengan kata lain kami tolak permohonan tersebut. Tidak ada pendukung yang mendesak kepentingan itu. Maka hakim tidak boleh mengabulkan permohonan tersebut. Sudah banyak kasus yang ditolak yang seperti itu. Kami menolak dengan tegas karena mereka hanya ingin mempersubur nikah siri saja. Mengenai *isbat* nikah massal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar, pada pemohon adalah rata-rata pasangan yang sudah memiliki anak yang kebanyakan anak dari mereka sudah ada yang bersekolah, ada yang sudah besar. Tentu saja anak tersebut kesulitan ketika ingin mendaftar kerja misalnya karena tidak lengkapnya berkas seperti tidak adanya kartu keluarga. Kala perkawinan mereka terbukti tidak melanggar apa salahnya kita pakai huruf e”<sup>^</sup>

Sama halnya yang telah dijelaskan oleh Drs. H. M. Yasin Irfan, SH. MH. Mengatakan bahwa:

“Alasan kita menerima dan mengabulkan kebanyakan perkara *isbat* nikah yang masuk, walaupun itu nikah siri yang terjadi setelah tahun 1994, seperti pada *isbat* nikah massal kemarin adalah kami melihat dari sisi kemaslahatan, untuk menaggulngi masa depan si anak. Memang kalau pendekatan normatif

<sup>^</sup>Drs. Chaeruddin, MH, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, 09 Februari 2016.



itu memang tidak diperkenankan untuk diisbatkan tapi ingat bahwa hakim itu bukan corong Undang-undang, hakim juga tidak boleh menolak perkara yang dilimpahkan kepadanya. Dalam hal ini hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, biasanya kebanyakan pasangan menikah siri karena di daerahnya itu sudah menjadi kebiasaan dan terkadang sudah menjadi adat. Kemudian menurut saya, sepanjang itu memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam yang kami terima dan kabulkan permohonan dari pasangan tersebut meskipun nikah siri tersebut terjadi setelah tahun ١٩٧٤. Jadi ujung-ujungnya Pasal yang kami gunakan kalau saya yaitu Pasal ٧ ayat ٣e. itu nikah siri tidak otomatis juga bisa dikabulkan tidak otomatis juga kami tolak. Kami tetap memeriksa keadaan perkawinan tersebut, jangan sampai ini isbat nikah dalam hal poligami tetapi belum mendapat izin dari isteri sebelumnya atau ini isbat nikah untuk poliandri jelas tidak diperbolehkan”<sup>٩</sup>

Secara singkat Pertimbangan dan dasar hukum seorang Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam mengabulkan isbat nikah terhadap nikah siri yang pernikahannya dilakukan setelah tahun ١٩٧٤ adalah sebagai berikut:

Terdapat pada perkara No. ٤٠٦/Pdt.P/٢٠١٥/PA Mks, dengan Pertimbangan Hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas. Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal ٤٩ Ayat (١) huruf (a) Undang-undang RI Nomor ٧ Tahun ١٩٨٩ Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor ٣ Tahun ٢٠٠٦ dan perubahan kedua dengan Undang-undang RI Nomor ٥٠ Tahun ٢٠٠٩, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.<sup>١٠</sup>

<sup>٩</sup>Drs. H. M. Yasin Irfan, MH, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, ١١ Februari ٢٠١٦.

<sup>١٠</sup> Sumber data, Putusan Pengadilan Agama Makassar, ١١ Februari ٢٠١٦.



Hal senada yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H. M. Anas Malik, MH.

Mengatakan bahwa:

“Pasal ๖ ayat (๓e) sebenarnya mengantisipasi pernikahan siri yang terjadi bukan karena ketidak patuhan pasangan tersebut. Boleh jadi mereka tidak tahu, boleh jadi keadaan yang membuat mereka melakukan nikah siri, misalnya perkawinan yang terjadi di pulau yang KUAnyanya jauh, mereka akan lebih memilih untuk menikah tidak dihadapan atau tidak dengan sepengetahuan pegawai pencatat nikah. Perkawinan mereka sudah sesuai dengan hukum Islam, syarat dan rukun sudah terpenuhi, tetapi KUAnyanya yang jauh jadi mereka menikah siri saja. Persoalan-persoalan seperti itulah yang dicover dan diantisipasi oleh Pasal ๖ ayat ๓e ini. Pasal ๓e ini mengantisipasi fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang bertentangan dengan UU. Seperti faktanya perkawinan yang tidak tercatat tetapi mereka tinggal di gunung atau pulau yang terpencil yang sulit dijangkau oleh PPN. Huruf d bertentangan tetapi e tidak. Ada pelenturan aturan atau pelenturan hukum yang ada”<sup>๑๑</sup>

Secara singkat Pertimbangan dan dasar hukum seorang Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam mengabulkan isbat nikah terhadap nikah siri yang pernikahannya dilakukan setelah tahun ๑๙๖๔ adalah sebagai berikut:

Terdapat pada perkara No. ๔.๐.๖/Pdt.P/๒.๐.๑๐/PA. Mks, dengan Pertimbangan Hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas. Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal ๔๙ Ayat (๑) huruf (a) Undang-undang RI Nomor ๖ Tahun ๑๙๙๙ Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor ๓ Tahun ๒๐๐๖ dan

<sup>๑๑</sup> Drs. H. M. Anas Malik, MH, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, ๑๑ Februari ๒๐๑๖.

perubahan kedua dengan Undang-undang RI Nomor ٥٠ Tahun ٢٠٠٩, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.<sup>١٢</sup>

Dalam hal ini, Bapak Drs. Chaeruddin, MH. Menyatakan bahwa:

“Pada perkara isbat nikah khususnya pada penetapan isbat nikah massal yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar, selama persidangan hakim menilai mengenai perkawinan mereka, sepanjang tidak ada halangan menurut UUP, maka permohonan dikabulkan. Itu yang dipakai oleh hakim dengan membawa pertimbangan yang lain, seperti melihat anak sudah lahir, ada kebutuhan si anak. Maka semat-mata hanya untuk kepentingan si anak, untuk akta kelahiran, hakim melihat anak itu sebagai korban dari adanya perkawinan ini, jadi hakim menggunakan Pasal ٧ ayat (٣e) KHI yang didukung dengan pertimbangan mengenai keadaan dan kepentingan si anak tadi. Juga melihat apakah perkawinannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>١٣</sup>

Penetapan pertimbangan hakim pada perkara No. ٤٠٦/Pdt.P/PA Mks, Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, amak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan pemohon I si A dan pemohon II si B telah dilangsungkan pada tanggal ٢٠ September ١٩٩٠, dengan mahar berupa Emas ٧ Gram dan Seperangkat Alat Sholat, dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah si C dan si D, dinikahkan oleh Imam yang bernama si E dan yang menjadi wali adalah si F dari pemohon II.
- Bahwa, pemohon I si A berstatus perjaka dan pemohon II si B berstatus perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

<sup>١٢</sup> Sumber data Putusan, Pengadilan Agama, Makassar, ١١ Februari ٢٠١٦.

<sup>١٣</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, ١١ Februari ٢٠١٦.

Menimbang bahwa pernikahan pemohon I si A dan pemohon II si B telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara sebelumnya, maka ada pula pendapat hakim yang memiliki perbedaan Bapak Drs. H. M. Yasin Irfan, MH. Mengatakan:

“Mengabulkan permohonan mereka adalah semata-mata untuk kemaslahatan, walaupun secara aturan itu tidak diperkenankan, tetapi perlu diingat bahwa hakim itu bukan corong undang-undang. Jadi hakim memutus perkara dengan melihat pertimbangan yang lain, tidak selalu berfokus pada peraturan. Pertimbangannya itu adalah kemaslahatan untuk melindungi masa depan si anak.”<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat hakim di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim ketika mengabulkan perkara *isbat* nikah tersebut yaitu Menurut majelis Hakim pertimbangan dasar hukum dalam memeriksa dan mengabulkan *isbat* nikah tersebut diantaranya:

1. Alasan masalah mursalah artinya seorang hakim bersedia mengabulkan perkara *isbat* nikah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga, melihat anak sudah lahir yang tentu kedepannya akan ada banyak kepentingan dari si anak yang sangat perlu dilindungi. Misalnya seorang anak yang ingin masuk sekolah namun tidak mempunyai Akta kelahiran, sedang untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan akta nikah, karena orang tuanya melakukan nikah siri maka akhirnya mereka mengisbatkan nikah mereka demi anaknya. Dengan mengabulkan permohonan dari pihak orang tua maka akta

<sup>14</sup> Sumber data Putusan, Pengadilan Agama, Makassar, 11 Februari 2016.

<sup>15</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, 11 Februari 2016.

nikah akan terbit sehingga kepentingan si anak kedepannya akan terlindungi oleh hukum. Hal inilah yang menjadi dasar bagi seorang hakim mengabulkan *isbat* nikah.

٢. Karena Nikah Siri bagi sebagian masyarakat daerah merupakan sebuah kebiasaan, dan seorang hakim tidak boleh menolak perkara yang dilimpahkan kepadanya sehingga diharuskan menggali hukum adat setempat, hakim bukan corong Undang-undang, dalam hal ini hakim berpedoman pada kaedah *fiqh Al adah al muhakamah* (adat merupakan sebuah hukum) dan *dar'ul mafasyid maqomu ala jalbul masholeh*. Walaupun oleh pernikahan siri dilakukan oleh orang yang mampu sekalipun.
٣. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan dalam Pasal ٧ ayat (٣e), “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤”. Pasal ini juga yang dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, sebagai dasar mengabulkan *isbat* nikah. Karena dalam pandangan Majelis Hakim, Pasal tersebut merupakan bentuk antisipasi (cover) terhadap fakta yang bisa saja terjadi bagi pasangan nikah siri yang sebenarnya melangsungkan nikah siri bukan karena ketidak patuhan terhadap Undang-undang. Selama pernikahan tersebut sah (sesuai rukun-syaratnya) menurut syariah Islam maka ia dianggap tidak mempunyai halangan untuk mengisbatkan perkawinannya.

Untuk alasan nomor ٣ diatas penulis mempunyai pandangan lain terkait dengan Pasal ٧ ayat (٣e) yang berbunyi: “Perkawinan yang dilakukan oleh merek yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤”.

Menurut penulis sesungguhnya pasal ini berfungsi untuk menguatkan ayat-ayat sebelumnya seperti ayat ٣a, ٣b, ٣c, ٣d, menurut penulis yang dimaksud dengan “Mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤” yang dimaksud “Mempunyai halangan perkawinan” disini adalah ketika ada seorang peluka nikah siri yang menikah setelah Tahun ١٩٧٤ kemudian mengisbatkan pernikahannya, maka hal ini sudah melanggar ketentuan UUP, maka perkawinannya tidak boleh diisbatkan. Sedangkan menurut hakim Pengadilan Agama Makassar yang dimaksud dengan kata “Mempunyai halangan perkawinan” disini adalah mawni’un nikah seperti saudara sepersusuan, sesame muhrim dan lain sebagainya.<sup>١٦</sup>

Sesuai dengan penetapan pada putusan perkara NO. ٠٤/Pdt.P/٢٠١٥/PA/Mks, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal ٥ Januari ٢٠١٥ yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal ٢٩ Maret ٢٠٠٦ di Pannampu, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam si C dengan mahar berupa mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi wali adalah si D disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing si E dan si F;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

<sup>١٦</sup>Drs. H. M. Anas Malik, MH, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, ١١ Februari ٢٠١٦.

- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai ١ orang anak;
- Bahwa sejak perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Menimbang bahwa karena pernikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II yang berlangsung pada tanggal ٢٩ Maret ٢٠٠٦ di Pannampu, Kota Makassar. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon I dan pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagaimana warga Negara Republik Indonesia.<sup>١٧</sup>

<sup>١٧</sup> Sumber data Putusan, Pengadilan Agama, Makassar, ١١ Februari ٢٠١٦.

Karena sudah jelas bahwa setelah terbitnya UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ Tentang Perkawinan terutama dalam pasal ٧ ayat (٧) yang menjelaskan, “Tiap-tip perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka setiap perkawinan yang berlangsung harus dicatatkan sehingga tidak ada lagi namanya pernikahan siri, sehingga seharusnya seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara *isbat* terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah tahun ١٩٧٤. Pada dasarnya hal ini merupakan dilema bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, karena disatu sisi harus tunduk pada sebuah aturan perundang-undangan kemaslahatan umat.

***D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar secara umum terhadap Pasal ٧ ayat (٧e) Kompilasi Hukum Islam Tentang *Isbat* Nikah yang dilakukan setelah Tahun ١٩٧٤***

Menurut UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ Tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal ١). Hakekat Perkawinan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan khusus bagi masyarakat yang beragama Islam, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah” (Pasal ٧ KHI).

Kedalaman makna Perkawinan dalam hukum Islam membawa konsekuensi bagi umat Islam untuk mentaati, menghargai, menghormati dan memelihara lembaga perkawinan, terutama oleh pasangan suami isteri. Sebaliknya, jika melakukan



distorsi dan pencemaran dengan tindakan yang tidak selaras dengan hakekat perkawinan merupakan kesia-siaan dan akan mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga terutama bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, isteri, dan anak-anak. Untuk terjamin dan terlindunginya pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sahnya status hukum perkawinan menjadi sangat penting dan menentukan. Perkara yang timbul dalam kehidupan keluarga yang diakibatkan pelanggaran hak-haknya akan mendapatkan perlindungan hukum, bilamana status hukum perkawinan sah, (baik secara syari'at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia).

UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ Tentang Perkawinan telah menentukan bahwa:

١. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal ٢ (١))
٢. Tiap-tiap perkara dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal ٢ (٢))

Berdasarkan ketentuan pasal ini, dapat dipahami bahwa bagi umat Islam, perkawinan yang sah dan sekaligus mendapat pengakuan serta perlindungan hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Syari'ah Islam yakni memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat Nikah dan dicatat sesuai perlindungan yang berlaku. Sehingga suami-isteri memperoleh akta nikah (buku nikah). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal ٢ (١) KHI).

Berdasarkan hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Makassar, maka Bapak Drs. Chaeruddin, MH. Menyatakan bahwa:

*“Nikah Siri (dibawah tangan) yang dilakukan sebelum di Undangkan dalam UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ boleh diisbatkan sebagaimana yang dimaksud oleh*



*UU Perkawinan. Yang menjadi masalah adalah nikah siri yang dilakukan pasca UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ apakah dapat di Isbatkan dalam Pengadilan Agama..? hal ini mengundang pro-kontra, ada pakar hukum yang mengatakan pernikahan siri yang dilakukan setelah diterbitkan UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ tidak boleh di Isbatkan atau permohonan Isbatnya ditolak, dengan alasan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat (pelaku nikah siri) dan lelaki hidung belang agar tidak meremehkan kesakralan perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan. Namun dalam praktek dilapangan banyak masyarakat (suami-isteri) yang mengajukan permohonan Isbat Nikah baik yang nikahnya (nikah siri) yang dilakukan sebelum terbitnya UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤, maupun setelah terbitnya UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤. Pengadilan Agama atau Hakim tidak boleh menolak perkara, semua perkara diproses sesuai aturan yang berlaku, termasuk perkara isbat nikah ini. Dalam persidangan, sepanjang nikahnya (nikah siri) dilakukan sesuai dengan aturan Agama Islam artinya menurut syarat-rukun pernikahan maka Majelis Hakim akan mengisbatkan atau mensahkan nikah mereka”<sup>١٨</sup>.*

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan Syari’ah Islam tanpa dicatitkan sebagaimana dikehendaki oleh UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ Tentang Perkawinan, maka disebut sebagai perkawinan liar atau perkawinan dib awah tangan dan yang sedang actual sekarang disebut nikah siri. Di Indonesia pernikahan seperti itu (nikah siri) tidak dapat perlindungan hukum.

Sehubungan dengan hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hakim secara umum berkenaan dengan Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Makassar sebagaimana ketentuan Pasal ٧ ayat ٢e KHI yang berbunyi: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang RI No. ١ Tahun ١٩٧٤”

Sama halnya dengan wawancara sebelumnya, Bapak Drs. H. M. Yasin Irfan, MH. Mengatakan bahwa:

*“Ini bisa jadi landasan bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena dalam pasal ٧ ayat (٢e) dalam Kompilasi Hukum Islam ini*

<sup>١٨</sup>Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, ١١ Februari ٢٠١٦.

*menjelaskan: “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤” Maksudnya adalah selama si Pelaku nikah siri itu tidak terdapat halangan waktu nikahnya dulu, seperti hubungan sedarah, dalam masa iddah dll, maka masih boleh diisbatkan. Pengesahan (isbat) nikah siri memang ya penting tanpa adanya pengesahan (Isbat) maka dia jadi susah sendiri, walaupun seharusnya sesuai aturan isbat nikah ini hanya boleh dilakukan terhadap pernikahan siri yang dilakukan sebelum tahun ١٩٧٤. Tapi ternyata juga masih ada saja praktek nikah siri ini dampaknya kalau orang-orang yang belum mengerti seperti orang desa yang baru ke kota pastikan akta nikah itu kan juga dibutuhkan. Sebenarnya adanya isbat itu adalah bentuk kelalaian dari pelaku nikah siri yang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, seperti nikah siri itu kan nikah yang sembunyi-sembunyi dan tidak memiliki kekuatan hukum, nanti akan berakibat terhadap anak yang dilahirkan nanti misalkan jadi sulit untuk mendapatkan hak warisan.”<sup>١١</sup>*

Sedangkan mengenai pasal ٧ ayat (c) yang isinya: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤” yang digunakan sebagai alasan oleh hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah yang masuk, hakim beranggapan bahwa pasal tersebut berlaku bagi semua pelaku nikah siri yang ingin mengisbatkan dirinya baik pernikahan siri tersebut dilakukan sebelum tahun ١٩٧٤ ataupun setelah tahun ١٩٧٤ selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Senada dengan hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Makassar. Bapak Drs. H. M. Anas Malik, MH. Mengatakan bahwa:

*“Pasal ٧ ayat (c) ini menjelaskan tentang bahwa isbat nikah ini boleh dilakukan jika seorang pemohon tidak terhalang oleh perkawinan semisal hubungan darah (Pasal ١٤ ayat ١ UU No. ١٩٧٤). Jadi selama si pemohon (pelaku nikah siri) dulunya nikah sesuai dengan syarat dan rukun dalam agama Islam maka boleh diisbatkan. Kemudian yang boleh diisbatkan juga itu kan masih ada a (adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian), b (hilangnya akta nikah), dst. Seperti b untuk akta yang hilang bisa minta duplikatnya di KUA pada situasi tertentu seperti di Aceh yang*

<sup>١١</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, ١١ Februari ٢٠١٦.

*KUAnyā luluh lantah karena tsunami, itukan tidak bisa diketemukan, padahal pernikahannyasetelah tahun ١٩٧٤, hal-hal seperti itulah yang bisa diisbatkan kembali, dengan memanggil saksi-saksi karena di Pengadilan Agama menolak atau menerima itukan berdasarkan hasil dipersidangan. Tidak semua orang yang mengajukan isbat nikah langsung kita kabulkan tapi berdasarkan hasil pemeriksaan. Seperti ayat ٣d sehingga intinya jika perkawinan dilakukan menurut agamanya dan tidak dapat di buktikan akta nikahnya maka boleh di isbatkan. Tapi nanti hakim sendiri juga yang akan meneliti mengapa dengan perkawinannya sekalipun sudah sah menurut agama tapi tidak tercatat di KUA, masing-masing orang itukan alasannya berbeda-beda, itu juga kita nilai latar belakang mereka melakukan Isbat nikah. Selama ini alasannya tidak ada biaya, alasan pribadi seperti suami isteri masih sama-sama bersekolah sehingga tidak ingin diketahui orang lain.*<sup>٣٠</sup>

Secara singkat pendapat Hakim Pengadilan Agama Makassar terkait dengan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Pasal ٧ ayat (٣e) Kompilasi Hukum Islam Tentang Isbat Nikah yang dilakukan setelah Tahun ١٩٧٤ adalah sebagaimana table berikut:

No.	Hakim	Pandangan
١	Drs. Chaeruddin, MH.	Pengadilan Agama atau Hakim tidak boleh menolak perkara, semua perkara diproses sesuai aturan yang berlaku, termasuk perkara isbat nikah ini. Dalam persidangan, sepanjang nikahnya (nikah siri) dilakukan sesuai dengan aturan Agama Islam artinya menurut syarat-rukun pernikahan maka Majelis Hakim akan mengisbatkan atau mensahkan nikah mereka.
٢	Drs. H. M. Yasin Irfan, MH.	Selama si Pelaku nikah siri itu tidak terdapat halangan waktu nikahnya dulu, seperti hubungan sedarah, dalam

<sup>٣٠</sup> Drs. H. M. Anas Malik, MH, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, ١١ Februari ٢٠١٦.

		massa iddah dll maka masih boleh diisbatkan Nikah Sirinya.
3	Drs. H. M. Anas Malik, MH	Selama si Pemohon (pelaku nikah siri) dulunya nikah sesuai dengan syarat dan rukun dalam Agama Islam maka boleh diisbatkan. Namun untuk dikabulkan atau tidak itu tergantung pemeriksaan.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun permohonan isbat nikah yang pernikahan sirinya dilakukan sebelum maupun setelah terbitnya UU RI No. 1 Tahun 1974, pengadilan tetap memprosesnya sampai kepersidangan dan Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi rukun syarat pernikahan maka permohonan isbat nikah tersebut tetap dikabulkan.

***E. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika permohonan Isbat Nikah terhadap Nikah Siri yang terjadi setelah 1974 dikabulkan***

Selanjutnya penulis melanjutkan dengan pertanyaan mengenai dampak yang terjadi ketika permohonan isbat nikah terhadap nikah siri yang terjadi setelah tahun 1974 dikabulkan.

Berdasarkan hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Makassar, Bapak Drs. Chaeruddin, MH. Mengatakan bahwa:

“Dari setiap perkara isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim, serta melihat banyaknya perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama, salah satu contohnya yaitu isbat nikah massal kemarin yang jumlah permohonan itu sangat banyak. Para hakim terutama saya sendiri menyadari akan dampak yang bisa muncul dan bahkan menurut saya dampak tersebut sudah terjadi.

Masyarakat sudah banyak yang berfikir menggampangkan dan meremehkan pentingnya pencatatan nikah ini, “biarlah nikah siri dulu, kan nantinya bisa diisbatkan”. Kemudian jika hal ini terus berlangsung maka nikah siri di Negara kita ini akan semakin subur, sehingga tak jarang pasangan nikah siri baru mensahkan perkawinannya jika da permasalahan terhadap kepentingan anak misalnya. Kalu tidak ada permasalahan yang dihadapi, mereka diam saja, tidak memperdulikan mengenai perkawinannya tersebut, walaupun belum sah menurut hukum yang penting sudah sah menurut Agama. Pemerintah harus turun tangan dengan cepat untuk hal ini, menurut saya kebanyakan masyarakat punya pola pikir kalau nikah siri aja sah menurut Agama kenapa harus dicatatkan, jadi yang harus kita rubah dulu adalah pola pikir dari masyarakat itu. Caranya dengan penyuluhan, sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah (nikah resmi) kr pada masyarakat, sah secara Agama sekaligus mendapat pengakuan dan perlindungan hukum sebagaimana yang dikehendaki Pasal ٢ ayat ١ dan ٢ UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤. Penyuluhan seperti ini harus terus dilakukan dengan melibatkan para pihak instansi yang terkait.<sup>٢١</sup>

Kemudian Yasin Irfan berpendapat bahwa:

“Walaupun dalam UUP sudah jelas bahwa semua perkawinan harus dicatatkan tapi mau bagaimana lagi ini kan fakta yang ada di masyarakat. Kalau tidak kita isbatkan ya kasihan korbannya itu sendiri. Mengenai dampak, kalau dampak positifnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap si anak, kalau dampak negatifnya dalah satunya, pelaksanaan UUP belum berlaku efektif. Dampak negative yang lain adalah menjadikan mashyarakat berfikirkan sudahlh gaknusah pake atura-aturan Negara yang pentig nikah sudah sah menurut Agama, nah dari pandangan tersebut nanti akan memunculkan stigma bahwa Negara tidak usah ikut campur dalam masalah Agama. Mengenai solusi, harus ada penyuluhan ke desa-desa, biar masyarakat bisa tau pentingnya pencatatan nikah ini. Selain penyuluhan bisa juga dari pihak KUA memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perkawinan, segala hal mengenai perkawinan melalui pengajian-pengajian.”<sup>٢٢</sup>

Dampak positif juga ada, dampak positifnya pastinya mereka (pelaku nikah siri) bahagia karena pernikahannya diisbatkan dan mendapatkan akta nikah. Mengenai dampak yang terjadi ini, pemerintah sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan untuk meredam dampak tersebut, seperti misalnya dengan adanya UU

<sup>٢١</sup> Drs. Chaeruddin, MH, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, ١١ Februari ٢٠١٦.

<sup>٢٢</sup> Drs. H. M. Yasin Irfan, MH, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, ١١ februari ٢٠١٦.

kependudukan tentang KTP, akta kelahiran yang ketat yang lama-lama akan mengurangi pelaku nikah siri yang akhirnya kan dampak-dampak tersebut juga akan berkurang, kalau saya sendiri itu yah sosialisasi, harus sosialisasi untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan dan penyelesaian sengketa, adapun kenapa bisa tidak tercatat itu dan penyelesaian sengketa, adapun kenapa bisa tidak tercatat itu terjadi pelanggaran kan permasalahan pada aparat seperti lurah, KUA, imam, yang melibatkan Departemen Agama dan Kementrian Agama.<sup>٢٢</sup>

Secara singkat pertimbangan para hakim mengenai dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika isbat nikah terhadap nikah siri setelah tahun ١٩٧٤ dikabulkan adalah sebagai berikut:

Dampak-dampak yang terjadi di masyarkat:

١. Dampak positif
  - a. Anak mendapatkan perlindungan hukum
  - b. Mereka pasangan nikah siri merasa bahagia karena pernikahannya diisbatkan dan mendapatkan akta nikah.
٢. Dampak negative
  - a. Masyarakat sudah banyak yang menggampangkan dan menyepelksn pencatatan nikah ini.
  - b. Pernikahan siri di Indonesia akan semakin subur.
  - c. Pelaksanaan UU No. ١ Tahun ١٩٧٤ Tentang Perkawinan belum berlaku efektif.

---

<sup>٢٢</sup> Drs. H. M. Anas Malik, MH, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, ١١ Februari ٢٠١٦.



- d. Menimbulkan fikiran terhadap masyarakat bahwa sah menurut Agama itu sudah cukup, sehingga tidak perlu pakai aturan-aturan Negara.
- e. Kepercayaan terhadap UU perkawinan berkurang, masyarakat seakan menyepelekan UU tersebut.
- f. Pelaku nikah siri seakan mempermainkan hukum Islam yang asalnya nikah siri itu boleh ternyata disalah gunakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang sama halnya dengan pendapat di atas, Bapak Drs. H. M. Anas Malik, MH. Mengatakan bahwa:

“Bahwa isbat nikah terhadap nikah siri baik nikah siri yang terjadi karena ketidak patuhan terhadap peraturan ataupun yang terjadi bukan karena tidak patuh dengan jelas akan menimbulkan dampak, saya kira dampak utama yaitu pengaruh pada penertiban hukum kedepannya, terhadap kepercayaan terhadap UUP itu sendiri, masyarakat seakan menyepelekan UU tersebut. pada UU tersebut dapat dipahami bahwa setelah berlakunya UU ini tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi kan dalam kenyataan tidak seperti itu dan itu seolah-olah mereka itu mempermainkan hukum Islam yang asalnya nikah siri itu boleh ternyata disalah gunakan, dan yang lebih parah lagi jika ada orang yang mempunyai iktikad tidak baik, mengaku telah nikah siri kemudian mengajukan permohonan isbat nikah karena sebelumnya sudah kumpul kebo dan sudah punya anak. Untuk mengantisipasi hal semacam ini, Majelis Hakim harus hati-hati dalam memeriksa perkara isbat nikah ini. Dalam tahap pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi harus diperiksa sedemikian rupa, bahkan saksi-saksi yang menyaksikan pernikahan sirinya, atau wali nikahnya dan keluarga dari suami-isteri tersebut dipanggil dan dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangan.”<sup>٧٤</sup>

Adapun solusi yang diberikan Majelis Hakim untuk menanggulangi dampak tersebut sehingga bisa lebih menertibkan pengaturan perkawinan kedepannya yaitu dengan memberikan saran kepada pihak terkait seperti KUA, DEPAG, PA, serta Pemerintah pusat untuk memberikan sosialisasi, dan penyuluhan tentang manfaat

<sup>٧٤</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama, Makassar, ١١ Februari ٢٠١٦.

nikah resmi (dicatatkan nikahnya) secara berkelanjutan dan terpadu artinya kegiatan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan menjadi agenda rutin. Berusaha memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ketika kita mencatatkan pernikahan kita di KUA maka sebagai akibatnya kita akan mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.

Sebaliknya jika kita melakukan pernikahan siri maka kita akan sulit mendapatkan perlindungan hukum karena kita tidak mempunyai bukti sah (buku nikah) sebagai suami isteri. Penyuluhan tersebut dilakukan di berbagai daerah-daerah terutama di desa-desa yang rawan terjadinya praktik Nikah siri. Karena tanpa adanya peran serta semua pihak maka sampai kapanpun pernikahan siri akan selalu terus ada dan hal ini akan mengganggu perkembangan penduduk Indonesia.

Akta nikah adalah sebagai bukti otentik adanya suatu perkawinan seseorang yang sangat bermanfaat bagi diri dan keluarganya (isteri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan terjadinya pengingkaran atas perkawinannya dan merupakan akibat hukum dari pernikahan tersebut. Namun tidak semua masyarakat memahami akan hal ini. Banyak yang kurang memahami akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan siri.

Walaupun pernikahan tersebut sah menurut Agama namun mereka tidak akan mendapat perlindungan hukum dari Negara karena dalam Pandangan Hukum Positif, mereka belum dikatakan sebagai suami isteri yang sah. Karena mereka tidak memiliki akta nikah sebagai bukti. Namun demikian, banyak dari masyarakat yang pada awalnya melakukan nikah siri dan pada akhirnya mereka melakukan iṣbāt nikah di Kantor Pengadilan Agama.



Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan Negara, pada dasarnya fungsi pencatatan pernikahan pada KUA dan lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap abash sebagai bukti adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Negara.

Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti di hadapan Majelis Peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Secara singkat pertimbangan hakim terhadap dampak yang terjadi ketika setiap permohonan Isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Makassar ini dikabulkan sebagaimana table berikut:

NO.	Hakim	Pandangan	
		Dampak	Solusi
١.	Drs.Chaeruddin, MH.	١. Masyarakat cenderung menggampangkan dan meremehkan pentingnya pencatatan nikah ini. ٢. Mengaku telah nikah siri kemudian mengajukan permohonan <u>isbat</u> nikah	Dengan penyuluhan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah (nikah resmi), sah secara agama sekaligus mendapat perlakuan dan perlindungan hukum

		<p>karena sebelumnya sudah kumpul kebo dan sudah punya anak.</p>	<p>sebagaiaman yang dikehendaki pasal ٢ ayat ١ dan ٢ UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤. Penyuluhan pada masyarakat tentang hal ini harus terus digalakkan secara terpadu dengan melibatkan para pihak dan instansi yang berkompeten.</p>
٢.	<p>Drs. H. M. Yasin Irfan, MH.</p>	<p>١. Dampak positifnya pastinya mereka (pelaku nikah siri) bahagia karena diisbat dan mendapatkan akta nikah</p> <p>٢. Dampak negative adalah seolah-olah mereka itu mempermainkan hukum Islam yang asalnya nikah siri itu boleh ternyata disalah gunakan.</p> <p>٣. Menganggap pencatatan nikah tidak penting, karena sudah merasa</p>	<p>Harus ada penyuluhan ke desa-desa, seperti melalui pengajian-pengajian selalu disinggung tentang pentingnya pencatatan nikah agar masyarakat tahu akan pentingnya pencatatan nikah ini.</p>

		nikah secara sah menurut agama.	
٣.	Drs. H. M. Anas Malik, MH.	<p>١. Dampak positifnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap si anak.</p> <p>٢. Dampak negative salah satunya, pelaksanaan UU RI NO. ١ Tahun ١٩٧٤ tentang pencatatan nikah tidak berlaku efektif</p> <p>٣. Dampak negative selanjutnya adalah masyarakat muslim beranggapan bahwa pencatatan nikah tidak berlaku lagi. Karena nanti bisa diisbatkan</p> <p>٤. Akan semakin menjamurnya para pelaku nikah siri karena mudah untuk diisbatkan.</p>	<p>Harus diadakan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, kepada masyarakat Indonesia agar dampak negative yang ada bisa diminimalisir dari pemerintah untuk membuat peraturan baru terkait dengan masalah ini.</p>

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara *isbat* nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah terbitnya UUP khususnya pada putusan atau penetapan *isbat* nikah massal adalah semata-mata untuk kemaslahatan umta, untuk menjaga kemaslahatan anggota keluarga dari pemohon, melindungi kepentingan anak yang lahir kemudian dari pasangan tersebut. Kemudian seorang hakim mempunyai prinsip bahwa setiap perkara yang masuk dalam lingkungan peradilan agama haruslah diterima, hakim bukan corong Undang-undang, termasuk pernikahan siri yang dilakukan setelah terbitnya UU RI No. 1 Tahun 1974. Untuk permasalahan dikabulkan atau tidak itu berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Selain itu Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 4 ayat (3).
2. Pandangan para hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap Pelaksanaan *isbat* nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah terbitnya UU RI No. 1 Tahun 1974 adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat, selain itu Majelis Hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup kuat untuk mengabulkan perkara tersebut. Diantaranya adalah **pertama**, seorang hakim berpedoman pada sebuah kaedah hukum fiqh, **kedua**, bahwa seorang hakim mempunyai prinsip bahwa setiap perkara yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama haruslah diterima, termasuk pernikahan siri yang dilakukan setelah terbitnya UU RI No. 1 Tahun 1974. Untuk permasalahan

dikabulkan atau tidak itu berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Selain itu Majelis Hakim berpedoman pada pasal ٧ ayat (٣e).

٣. Hakim di Pengadilan Agama Makassar menyadari akan dampak yang terjadi apabila setiap perkara *isbat* nikah di Pengadilan Agama Makassar dikabulkan, utamanya perkara nikah siri, diantaranya yaitu: banyaknya masyarakat yang meremehkan pentingnya pencatatan nikah dan pembuatan akta nikah karena mereka berfikir bahwa hal itu dapat dilakukan kapan saja. Selain itu juga akan semakin menjadi kebiasaan yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia akan aktifitas pernikahan siri ini yang akhirnya akan mempersubur status pernikahan ini. Selanjutnya solusi yang diberikan untuk permasalahan ini yaitu dengan menyarankan kepada pihak-pihak terkait seperti DEPAG, KUA, PA, serta pemerintah pusat untuk selalu memberikan penyuluhan secara berkelanjutan dan terpadu jika perlu menjadi agenda rutin mengenai pentingnya pencatatan nikah. Karena selama ini Majelis Hakim mengamati bahwa penyuluhan yang dilakukan sangat minim dan cenderung spontanitas dan tidak terpadu.

## B. *Saran*

١. Pernikahan siri yang dilakukan masyarakat selama ini cenderung membawa banyak kerepotan dan mudharat. Untuk itu sebaiknya Pengadilan Agama Kota Makassar lebih mempersempit lagi terhadap pengabulan perkara *isbat* nikah terhadap perkawinan siri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. ١ Tahun ١٩٧٤. Disamping itu pemerintah seharusnya membuat suatu aturan

baru mengenai isbat nikah karena aturan yang sekarang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan sudah banyak menuai kontroversi.

٢. Perlu ada tindak lanjut bagi pihak terkait seperti DEPAG, KUA, PA, serta pemerintah pusat terkait dengan penyuluhan tentang pencatatan nikah bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang masih tabu dan masih belum mempunyai pengetahuan luas akan pentingnya pencatatan nikah.
٣. Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan baru terkait dengan pernikahan siri terutama yang lebih mengarah pada dampak positif. Karena peraturan perundang-undangan yang selama ini dipakai sudah layak untuk di amandemen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Andi Syamsu Alam dalam "Isbat Nikah Masih Jadi Masalah," dikutip dari [www.hukumonline.com/baca/ho11111111/isbat-nikah-masih-jadi-masalah](http://www.hukumonline.com/baca/ho11111111/isbat-nikah-masih-jadi-masalah), diakses 14 Januari 2016.

Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan Negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q, Dalil syar'i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh pasal 33 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970.

Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

*Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2000.

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat, 1999), h. 14.

Haq, Abdul dan Ro'uf Agus. *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh konseptual) (buku satu)*, Surabaya: Khalista, 2006.

Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hoeve, van. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 2003.

<http://www.mediaislam.Net/portal> opini dan solusi islami. (diakses pada 21 Februari 2011).

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial "Kualitatif of Kuantitatif"*. Jakarta: GP Pres, 2008.

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 1.

Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan bimbingan Islam kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, ١٤١٨ H.

*Kamus Hukum*. Bandung: Citra Kumbara, ٢٠٠٨.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal ٢٥.

Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE-UII, ١٩٩٥.

*Mimbar Hukum No. ٦٠ Tahun ١٩٩٦ September-Oktober*. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera Islam.

*Mimbar Hukum No. ٦٢ Tahun ٢٠٠٣ September-Oktober*. Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera Islam.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, ٢٠٠٥), h. ٧٩٨.

Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, ١٩٩٩), h. ١٧٥.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٢.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi; Bandung: Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٢.

Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, ٢٠٠٥.

Nazir, Muhammad. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, ٢٠٠٣.

Partanto, pius A dan Al Barry, M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Akola, ١٩٩٤.

PP NO. ١ Tahun ١٩٧٥ tentang Pelaksanaan UU No. ١ Tahun ١٩٧٤ tentang Perkawinan.

Pasal ١٣ ayat (٢) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*.



Pasal ٣ dan ٣ masing-masing terdiri dari ٣ ayat.

Pasal ٣ ayat ٤ Kompilasi Hukum Islam.

Pelmizar, *Pengesahan Perkawinan*, tulisan dalam situs [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), diakses pada ١٤ Januari ٢٠١٦.

Putusan MK No. ٤٦/PUU-VII/٢٠١٠ menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin mempunyai akibat hukum dengan ayah biologisnya, tidak lagi hanya dengan keluarga ibu.

Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, ٢٠٠١.

Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, ١٩٩٠.

Straus, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Bina Ilmu, ١٩٩٧.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, ٢٠٠٧.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, ٢٠٠٩.

UU RI No. ٣٢ Tahun ١٩٥٤ tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

UU RI No. ١ Tahun ١٩٧٤ tentang Perkawinan.

UU RI No. ٩ Tahun ١٩٧٥ tentang Pelaksanaan UU No. ١ Tahun ١٩٧٥.

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Permkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, ١٩٧٨.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Nurfadilah, lahir di Ujung Pandang pada tanggal ٢٤ April ١٩٩٤, anak kelima dari enam bersaudara. Lahir dari pasangan H. Agus Haris dan Almh. Hj. Nurmi. Bertempat tinggal di Jalan Onta baru No. ٨٧ Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang

### A. Identitas Pribadi

Alamat : Jalan Onta Baru No. ٨٧ Makassar  
 Telpn/Hp : ٠٨٥٢٩٨٩٢٧٦٩٦ atau ٠٨٩٦٨٠٤١٢٩١٩  
 Email : Fnur٦٦٤@yahoo.co.id

### B. Riwayat Pendidikan

- TK (Taman Kanak-kanak) Aisyah Islam (Tahun ١٩٩٩-٢٠٠٠)
- SD Negeri Mamajang ١ Makassar (Tahun ٢٠٠٠-٢٠٠٦)
- SMP Negeri ٢٩ Makassar (Tahun ٢٠٠٧-٢٠٠٩)
- SMK Negeri ١ Makassar (Tahun ٢٠١٠-٢٠١٢)
- Sarjana (S'), Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum.

### C. Organisasi yang ikuti

- Pramuka sejak SD.
- Lanjut Pramuka di SMP dengan jabatan Pratama Putri selama ٢ periode.

ALA UDDIN  
 M A K A S S A R

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PENETAPAN

Nomor ٤٠٦/Pdt.P/٢٠١٥/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni**, umur ٥٠ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Laikang No. ٦٠ RT. ٠٠١ RW. ٠٠٦, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

**Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo**, umur ٤٤ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Laikang No. ٦٠ RT. ٠٠١ RW. ٠٠٦, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, ٢٣ Nopember ٢٠١٥ yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor ٤٠٦/Pdt.P/٢٠١٥/PA Mks, pada tanggal ٢٥ Nopember ٢٠١٥ mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

١. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal ٢٠ September ١٩٩٠ di Laikang No. ٦٠ RT. ٠٠١ RW. ٠٠٦, dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Puang Beta, dengan mahar berupa Emas ٢ Gram dan Seperangkat Alat Shalat dan yang menjadi wali adalah Dg. Rala dan

disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Ngalle Dan H. Liwang

٢. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan
٣. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
٤. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan.
٥. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah ٤ orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Muh. Arsyad, Lahir tanggal ١٢ Agustus ١٩٩١
  - b. Muharmin Nur, Lahir tanggal ٠٧ Juni ١٩٩٥
  - c. Muh. Al-Qadri, Lahir tanggal ١٤ Mei ٢٠٠٠
  - d. Afandi, Lahir tanggal ٢٤ Juli ٢٠٠٤
٦. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
٧. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
٨. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

١. Mengabulkan permohonan pemohon.
٢. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni) dengan Pemohon II (Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo) yang terjadi pada tanggal ٢٠ September ١٩٩٠, di Laikang No. ٦٠ RT. ٠٠١ RW. ٠٠٦ sah menurut hukum;
٣. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Biringkanaya

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 23 Nopember 2010 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Baharuddin bin Dahong, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Laikang No. 60, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
  - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II yang telah menikah pada tanggal 20 September 1990, di Laikang No. 60 RT. 001 RW. 006, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama H. Puang Beta, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Dg. Rala pemohon II, maharnya berupa Emas 2 Gram dan Seperangkat Alat Shalat, yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Ngalle Dan H. Liwang;
  - c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus Perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
  - d. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. Ilyas bin Dahong, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Laikang No. 60, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;

- b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II yang telah menikah pada tanggal 20 September 1990, di Jalan Laikang No. 6 RT. 001 RW. 006, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama H. Puang Beta, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Dg. Rala pemohon II, maharnya berupa Emas 2 Gram dan Seperangkat Alat Shalat, yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Ngalle Dan H. Liwang;
- c. Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus Perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- d. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni dengan pemohon II Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo disahkan

menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni dengan pemohon II Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan meteril suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 1990, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni dengan seorang perempuan yang bernama Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo dengan mahar berupa Emas 2 Gram dan Seperangkat Alat Shalat dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing Dg. Ngalle Dan H. Liwang lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Puang Beta dan yang menjadi wali adalah Dg. Rala.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni dengan pemohon II Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo telah dilangsungkan pada tanggal 20 September 1990, dengan mahar berupa Emas 2 Gram dan Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Dg. Rala dan H. Taba, dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Puang Beta dan yang menjadi wali adalah Dg. Rala.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonan mereka mendalilkan bahwa pemohon I Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni berstatus perjaka dan pemohon II Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo berstatus Perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni dan pemohon II Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo serta antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni dan pemohon II Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo telah dilangsungkan pada tanggal 20 September 1990, dengan mahar berupa Emas 2 Gram dan Seperangkat Alat Shalat, dibayar tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Dg. Ngalle Dan H. Liwang, dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Puang Beta dan yang menjadi wali adalah Dg. Rala dari pemohon II.
- Bahwa, pemohon I Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni berstatus perjaka dan pemohon II Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo berstatus Perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni dan pemohon II Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni dan pemohon II Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai



halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 20 September 1990 di Laikang No. 60 RT. 001 RW. 006. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II di langsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni) dengan pemohon II (Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1990 di Laikang No. 60 RT. 001 RW. 006.
- Memerintahkan kepada pemohon I (Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni) dan pemohon II (Nurhadi binti H. Muhammad Dg. Ngempo) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Biringkanaya
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 111.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2010 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1432 *Hijriyah*. oleh Dr. Hj. Harijah D., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Drs. Haeruddin., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

ttd

**Dr. Hj. Harijah D., M.H.,**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Haeruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

- 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Proses : Rp. 50.000,-
- 3. Panggilan : Rp. 80.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 50.000,-
- 5. Materai : Rp. 1.000,-
- Jumlah** : **Rp. 111.000,-**

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,  
Panitera,**

**Drs. H. Jamaluddin**

Catatan :

Salinan penetapan ini diberikan kepada pemohon (**Mansyur Dg. Naba bin Dahono Dg. Seni**) atas permintaannya sendiri pada tanggal 03 Desember 2015.



## PENETAPAN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**Amir bin Sampara**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Usaha Jual beli rumah, bertempat tinggal di Jalan Bahagia, Lr. I, No.48, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut pemohon I;

**Linda binti Ratang**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bahagia, Lr. I, No.48, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 0 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 4/Pdt.P/2010/PA Mks, pada tanggal 0 Januari 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 29 Maret 2006 di Pannampu, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Made Karim, dengan mahar berupa mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali adalah Mustari dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bachtiar dan Nurdin;
2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda cerai dan pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi

perkawinan;

۳. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
۴. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
۵. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai ۱ orang anak yang masing-masing bernama Fitri Nur Alisa Amir (lahir tanggal ۸ Februari ۲۰۰۸);
۶. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
۷. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
۸. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

۱. Mengabulkan permohonan pemohon;
۲. Menyatakan pernikahan pemohon I (Amir bin Sampara) dengan pemohon II (Linda binti Ratang) yang terjadi pada tanggal ۲۹ Maret ۲۰۰۶, di Pannampu, Kota Makassar, sah menurut hukum;
۳. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya;
۴. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal ۰۵ Januari ۲۰۱۵ yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Made Amin, Imam Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen, (Bukti P);

**B. Saksi :**

1. **Sudirman bin Syamsuddin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Bahagia Rt. 01, Rw. 01, No. 38, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
  - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 29 Maret 2006, di Pannampu, Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Made Karim, yang bertindak sebagai wali adalah Mustari pemohon II, maharnya berupa mas kawin berupa seperangkat alat shalat, yang menjadi saksi adalah Bachtiar dan Nurdin;
  - c. Bahwa status pemohon I adalah duda cerai sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
  - d. Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
2. **Hatijah binti Juma'**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Bahagia Rt. 01, Rw. 01, No. 38, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
  - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 29 Maret 2006, di Pannampu, Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Made Karim, yang bertindak sebagai wali

- adalah Mustari pemohon II, maharnya berupa mas kawin berupa seperangkat alat shalat, yang menjadi saksi adalah Bachtiar dan Nurdin;
- c. Bahwa status pemohon I adalah duda cerai sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
  - d. Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Amir bin Sampara dengan pemohon II Linda binti Ratang disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I Amir bin Sampara dengan pemohon II Linda binti Ratang telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 8, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan pemohon dengan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2006, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama Amir bin Sampara dengan seorang perempuan yang bernama Linda binti Ratang dengan mahar berupa mas kawin berupa seperangkat alat shalat dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing Bachtiar dan Nurdin lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama Made Karim dan yang menjadi wali adalah Mustari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon dan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Amir bin Sampara dengan pemohon II Linda binti Ratang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2006, dengan mahar berupa mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Bachtiar dan Nurdin, dinikahkan oleh Imam yang bernama Made Karim dan yang menjadi wali adalah Mustari;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan



bahwa pemohon I Amir bin Sampara berstatus duda cerai dan pemohon II Linda binti Ratang berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I Amir bin Sampara dan pemohon II Linda binti Ratang serta antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I Amir bin Sampara dan pemohon II Linda binti Ratang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2006, dengan mahar berupa mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Bachtiar dan Nurdin, dinikahkan oleh Imam yang bernama Made Karim dan yang menjadi wali adalah Mustari paman pemohon II;
- Bahwa, pemohon I Amir bin Sampara berstatus duda cerai dan pemohon II Linda binti Ratang berstatus perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Amir bin Sampara dan pemohon II Linda binti Ratang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Amir bin Sampara dan pemohon II Linda binti Ratang tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 20 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai

halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 29 Maret 2016 di Pannampu, Kota Makassar. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon I dan pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II di langsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan II;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Amir bin Sampara) dengan pemohon II (Linda binti Ratang) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016 di Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Memerintahkan kepada pemohon I dan II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Membebankan kepada pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2016

*Masehi*, bertepatan dengan tanggal ١٤٣٦ *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Nurjaya, MH. dan Dr. H. Sukri HC., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Amiruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Nurjaya, MH.**

ttd

**Dr. H. Sukri HC., MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Amiruddin**

**Rincian Biaya Perkara :**

١. Biaya Pendaftaran : Rp. ٣٠.٠٠٠,-
٢. Biaya ATK Perkara : Rp. ٥٠.٠٠٠,-
٣. Biaya Panggilan : Rp. ١٤٠.٠٠٠,-
٤. Biaya Redaksi : Rp. ٥.٠٠٠,-
٥. Biaya Materai : Rp. ٦.٠٠٠,-

---

**Jumlah : Rp. ٢٣١.٠٠٠,-**

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

## PENETAPAN

Nomor ๐๒๐/Pdt.P/๒๐๑๔/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan “*isbath nikah*” yang diajukan oleh :

**Asma binti M. Saing**, umur ๒๙ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kancil Utara No. ๓๓ C, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat surat dan mendengar keterangan saksi saksi.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal ๑๐ Juli ๒๐๑๔ dibawah register perkara Nomor : ๐๒๐/Pdt.P/๒๐๑๔/PA Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya:

๑. Bahwa pemohon telah menikah dengan Lelaki Achmad Tola bin Baso pada tanggal ๑๙ Mei ๑๙๖๓ di Desa Tamangroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam Tamanroya yang bernama Dukka dan yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon yang bernama M. Saing, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. ๒๔,- (Enam Puluh Empat Rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Hamuda dan Abd. Malik.
๒. Bahwa sebelum kawin pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka.
๓. Bahwa pernikahan pemohon dengan Achmad Tola bin Baso telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

٤. Bahwa antara pemohon dengan Achmad Tola bin Baso tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
٥. Bahwa pemohon dengan Achmad Tola bin Baso dikaruniai ٧ orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. M. Nawawi bin Achmad Tola (Almarhum)
  - b. Nahayati binti Achmad Tola (umur ٤٨ tahun)
  - c. Machmud bin Achmad Tola (umur ٤٦ tahun)
  - d. Zaenab binti Achmad Tola (Almarhumah)
  - e. Nuraeni binti Achmad Tola (umur ٤٤ tahun)
  - f. Sulfiana binti Achmad Tola (umur ٤١ tahun)
  - g. Muh. Iqbal bin Achmad Tola (umur ٣٩ tahun)
٦. Bahwa sejak perkawinan pemohon dengan Achmad Tola bin Baso tidak pernah terjadi perceraian sampai Achmad Tola bin Baso meninggal dunia pada ٠٧ Juli ٢٠١٤.
٧. Bahwa pemohon menikah sebelum terbit UU No. ١ Tahun ١٩٧٤.
٨. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas SK Tunjangan Janda pada kantor PT. Taspen Makassar.

Berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut:

**Primer :**

١. Mengabulkan permohonan pemohon;
٢. Menyatakan pernikahan pemohon Asma binti M. Saing dengan Achmad Tola bin Baso yang terjadi Kabupaten Jeneponto pada tanggal ١٩ Mei ١٩٦٣, adalah sah menurut hukum;
٣. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon tanggal 10 Juli 2014 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Pensiun Nomor : SKEP/389/XIV/VIII/1983 tanggal 16 Agustus 1983 a.n. Achmad Tola, yang diterbitkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, bermaterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya dan diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIBP) Nomor : D 630.1.7980 tanggal 16 Agustus 1983 a.n. Achmad Tola yang diterbitkan oleh PT Taspen Cabang Makassar, bermaterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya dan diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/II/KSB/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 a.n. H. Achmad Tola yang dikeluarkan oleh Lurah Bontobiraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, bermaterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya dan diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 737102060840001 tanggal 20 April 2012 a.n. Hj. Asma Kanang, yang bermaterai cukup dan berstempel pos, kemudian majelis hakim memeriksa dan mencocokkan bukti tersebut ternyata sesuai aslinya dan diberi kode P4.

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1. **Muhammad Syukri bin Abdul Idris**, umur 40 tahun, agama Islam, selanjutnya menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal pemohon;
- Bahwa saksi adalah menantu pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis pernikahan pemohon, karena memang mereka telah menikah sebelum saya jadi menantunya, namun saksi pernah diceritakan oleh pemohon bahwa dirinya menikah pada tahun 1963 di Desa Tamangroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa suami pemohon bernama Achmad Tola bin Baso.
- Bahwa menurut keterangan pemohon bahwa yang menikahkan pemohon Asma binti M. Saing dengan suaminya yang bernama Achmad Tola bin Baso adalah imam kampung yang bernama Dukka.
- Bahwa menurut saksi yang bertindak sebagai wali pada pernikahannya adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama M. Saing.
- Bahwa menurut saksi yang bertindak sebagai saksi pada pernikahannya adalah Hamuda dan Abdul Malik.
- Bahwa yang saksi dengar bahwa yang menjadi mahar pada waktu akad nikah pemohon adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 64,- (enam puluh empat rupiah) bayar tunai.
- Bahwa sekarang suami pemohon yang bernama Achmad Tola bin Baso telah meninggal dunia.
- Bahwa almarhum Achmad Tola bin Baso meninggal dunia di Makassar pada tanggal 7 Juli 2014 karena sakit.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu menikah, pemohon Asma binti M. Saing berstatus perawan sedangkan suaminya yang bernama Achmad Tola bin Baso berstatus jejaka.
- Bahwa dari pernikahan pemohon Asma binti M. Saing dengan suaminya yang bernama Achmad Tola bin Baso telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.



- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut Undang-Undang.
- Bahwa dari pernikahan pemohon Asma binti M. Saing dengan almarhum suaminya yang bernama Achmad Tola bin Baso telah dikaruniai tujuh orang anak keturunan yakni anak yang pertama bernama M. Nawawi bin Achmad Tola, anak yang kedua bernama Nahayati binti Achmad Tola, anak yang ketiga bernama Machmud bin Achmad Tola, anak yang keempat Zaenab binti Achmad Tola, anak yang kelima bernama Nuraeni binti Achmad Tola, anak yang keenam bernama Sulfina binti Achmad Tola, dan anak yang ketujuh bernama Muh. Iqbal bin Achmad Tola.
- Bahwa dari ketujuh anak pemohon tersebut telah meninggal dunia dua orang anaknya yakni Nahayati dan Machmud telah meninggal dunia.
- Bahwa menurut saksi selama ini tidak pernah mendengar pihak lain kalau pemohon Asma binti M. Saing dengan suami Achmad Tola bin Baso tidak sah pernikahannya.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi maksud dari pemohon Asma binti M. Saing mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus surat-surat pensiunan janda demi kelengkapan administrasi pada PT. Taspen karena pemohon tidak memiliki buku nikah.

٢. **Mustari bin Johannes**, umur ٤٣ tahun, agama Islam, selanjutnya menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal pemohon;
- Bahwa saksi diambil sebagai anak angkat oleh pemohon sejak tahun ١٩٩٠-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis pernikahan pemohon, karena memang mereka telah menikah sebelum saya jadi menantunya, namun saksi pernah diceritakan oleh pemohon bahwa dirinya menikah pada tahun ١٩٦٣ di Desa Tamangroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa suami pemohon bernama Achmad Tola bin Baso.



- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa yang menikahkan pemohon Asma binti M. Saing dengan suaminya yang bernama Achmad Tola bin Baso adalah imam kampung yang bernama Dukka.
- Bahwa menurut keterangan saksi yang bertindak sebagai wali pemohon pada pernikahannya adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama M. Saing.
- Bahwa menurut keterangan saksi yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahannya adalah Hamuda dan Abdul Malik.
- Bahwa yang saksi dengar bahwa yang menjadi mahar pada waktu akad nikah pemohon adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 64,- (enam puluh empat rupiah).
- Bahwa sekarang suami pemohon yang bernama Achmad Tola bin Baso sudah meninggal dunia.
- Bahwa almarhum Achmad Tola bin Baso meninggal dunia di Makassar pada tanggal 7 Juli 2014 karena sakit.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu menikah, pemohon Asma binti M. Saing berstatus perawan sedangkan suaminya yang bernama Achmad Tola bin Baso berstatus jejaka.
- Bahwa dari pernikahan pemohon Asma binti M. Saing dengan suaminya yang bernama Achmad Tola bin Baso telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut Undang-Undang.
- Bahwa dari pernikahan pemohon Asma binti M. Saing dengan suaminya yang bernama Achmad Tola bin Baso telah dikaruniai tujuh orang anak yakni anak yang pertama bernama M. Nawawi bin Achmad Tola, anak yang kedua bernama Nahayati binti Achmad Tola, anak yang ketiga bernama Machmud bin Achmad Tola, anak yang keempat Zaenab binti Achmad Tola, anak yang kelima bernama Nuraeni binti Achmad Tola, anak yang keenam bernama Sulfina binti Achmad Tola, dan anak yang ketujuh bernama Muh. Iqbal bin Achmad Tola.

- Bahwa dari ketujuh anak pemohon tersebut telah meninggal dunia dua orang yakni Nahayati dan Machmud telah meninggal dunia.
- Bahwa menurut saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain keberatan kalau pernikahan pemohon Asma binti M. Saing dengan suaminya tidak sah.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi maksud dari pemohon Asma binti M. Saing mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus surat-surat pensiunan janda demi kelengkapan administrasi pada PT. Taspen karena pemohon tidak memiliki buku nikah.

Bahwa kemudian pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain mohon penetapan dan akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup dan majelis akan menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 huruf (b) serta penjelasan umum alinea 2 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dan secara formil dapat diperiksa, diadili dan diterima sebagai perkara volunter.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pemohon, yang wajib dibuktikan secara hukum adalah apakah pernikahan pemohon (Asma binti M. Saing) dengan suaminya (Almarhum Achmad Tola bin Baso), telah

memenuhi rukun dan syarat syarat pernikahan menurut hukum Islam dan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalilnya, pemohon telah mengajukan ٤ (empat) bukti surat yaitu dengan tanda : P.١, P.٢, P.٣ dan P.٤, serta ٢ (dua) orang saksi yang selengkapanya termuat pula dalam duduk perkara penetapan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon (Asma binti M. Saing) dan suaminya (Almarhum Achmad Tola bin Baso) telah menikah pada tanggal ١٩ Mei ١٩٦٣ di Desa Tamangroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan, begitupula suaminya berstatus sebagai jejak dan keduanya tidak mempunyai halangan melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah maupun karena sesusuan.
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya (Achmad Tola bin Baso) telah dikaruniai tujuh orang anak yakni :
  - ١. M. Nawawi bin Achmad Tola (Almarhum)
  - ٢. Nahayati binti Achmad Tola (umur ٤٨ tahun)
  - ٣. Machmud bin Achmad Tola (umur ٤٦ tahun)
  - ٤. Zaenab binti Achmad Tola (Almarhumah)
  - ٥. Nuraeni binti Achmad Tola (umur ٤٤ tahun)
  - ٦. Sulfiana binti Achmad Tola (umur ٤١ tahun)
  - ٧. Muh. Iqbal bin Achmad Tola (umur ٣٩ tahun)
- Bahwa pemohon dan Achmad Tola bin Baso tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon melakukan isbat nikah (pengesahan nikah) ini semata mata pengurusan kelengkapan berkas Tunjangan Janda pada Kantor PT. Taspen Makassar.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diperiksa dipersidangan, setelah diklarifikasi dan disesuaikan dengan aslinya ternyata semuanya dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan fungsi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang undangan, memuat waktu pembuatan yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa kedua bukti surat yang diperiksa, isinya berhubungan langsung dengan apa yang diperkarakan oleh pemohon tidak bertentangan dengan aturan hukum, agama, kesusilaan, dan bentuk perundang undangan lainnya dan sengaja dibuat sesuai peruntukannya dan tidak ada yang bertentangan dengan maksud dan tujuan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan keduanya telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara yuridis telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan keterangan yang disampaikannya itu saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara yuridis formal telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formal dan materil, serta batas minimal yang ditentukan dalam Undang Undang, maka bukti surat dan keterangan kedua orang saksi dari pemohon, menurut hukum sah sebagai alat bukti dan dalil dalil yang dikuatkan patut dinyatakan benar dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat surat dan keterangan saksi saksi, majelis hakim menemukan fakta fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon (Asma binti M. Saing) dan suaminya (Achmad Tola bin Baso) telah menikah pada tanggal 19 Mei 1963 di Desa Tamangroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan, begitupula suaminya berstatus sebagai jejak dan keduanya tidak mempunyai halangan melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah maupun karena sesusuan.
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya (Achmad Tola bin Baso) telah dikaruniai tujuh orang anak yakni :

1. M. Nawawi bin Achmad Tola (Almarhum)
2. Nahayati binti Achmad Tola (umur 48 tahun)
3. Machmud bin Achmad Tola (umur 46 tahun)
4. Zaenab binti Achmad Tola (Almarhumah)
5. Nuraeni binti Achmad Tola (umur 44 tahun)
6. Sulfiana binti Achmad Tola (umur 41 tahun)
7. Muh. Iqbal bin Achmad Tola (umur 39 tahun)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum, apabila nikahnya dilakukan menurut hukum agama. Bagi yang beragama Islam, maka hubungan hukum nikahnya harus dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditentukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, antara lain ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa apabila fakta fakta yang ditemukan diarahkan kepada ketentuan hukum, atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta fakta, permintaan pemohon sebagaimana dimaksud di dalam petitum primer angka 1 dan 2, *menurut hukum telah cukup beralasan dan patut dikabulkan. Majelis hakim menyatakan sah pernikahan pemohon, Faridah binti*

*Johanes dengan Maksi Milianus Ebbo bin Benediktus Taa yang dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 2007 di Kota Makassar.*

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini hanya dapat dipergunakan oleh pemohon (Asma binti M. Saing) dengan lelaki (Achmad Tola bin Baso) untuk mengurus hak dan kepentingan hukumnya dalam rangka pengurusan kelengkapan berkas untuk mengurus SK Tunjangan Janda pada Kantor PT. Taspen Makassar berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *berjumlah Rp. 101.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah), patut dibebankan kepada pemohon.*

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menyatakan sah perkawinan pemohon (Asma binti M. Saing) dengan lelaki (Achmad Tola bin Baso) yang telah dilangsungkan di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 19 Mei 1963;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 101.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 12 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1435 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dr. Hj. Harijah D, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Haeruddin.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. Harijah D, M.H.**

ttd

**Drs. H.M. Anas Malik, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Drs. Haeruddin.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

**Untuk Salinan,  
Panitera,**

**Drs. H. Jamaluddin**